

BAB 3

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MINIMNYA ALOKASI ANGGARAN PERTAHANAN INDONESIA TAHUN 2000-2004

Dalam bab ketiga ini akan dibahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan minimnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia khususnya dalam periode 2000-2004. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan anggaran pertahanan sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain perkembangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi nasional, kemampuan keuangan negara, skala prioritas pembangunan, dan pandangan terhadap hakikat ancaman yang dihadapi negara.⁸⁶ Namun faktor-faktor yang dibahas dalam tesis ini lebih melihat kepada pandangan terhadap hakikat ancaman yang dihadapi oleh negara.

Analisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran pertahanan Indonesia ini menggunakan pendekatan *Fear* yang diambil dalam *Alternative Hypotheses About The Growth-Military Expenditures Relationship* yang ditulis oleh Jasen Castillo, Julia Lowel, dan kawan-kawan. Dalam pendekatan *Fear* ini disampaikan bahwa negara akan meningkatkan belanja militer ketika negara tersebut merasakan ancaman yang meningkat terhadap keamanan mereka. Dengan demikian dibutuhkan indikator-indikator ancaman yang dipertimbangkan oleh sebuah negara untuk menganalisa atau mengevaluasi lingkungan strategis mereka. Indikator-indikator tersebut adalah *aggregate capabilities of other states, geography, offense-defense balance* dan *perception of intentions*. Dengan menggunakan keempat indikator tersebut sebuah negara dapat menentukan apakah ada ancaman yang mengancam keutuhan negara tersebut atau tidak, khususnya ancaman yang datang dari negara tetangga negara mereka.

Dalam hal minimnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia, pada bagian ini penulis akan menganalisa persepsi ancaman Indonesia menggunakan keempat indikator tersebut dengan membandingkan terhadap negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, khususnya negara-negara besar yang berada di kawasan Asia Tenggara.

⁸⁶ Timotius D. Harsono, *Op. cit.*, hal. 103.

3.1. Aggregate Capabilities of Other States

Penggunaan istilah *aggregate capabilities* ini mengacu kepada kemampuan ekonomi dan kekuatan militer yang dimiliki oleh sebuah negara. Untuk mengukur kemampuan ekonomi sebuah negara banyak hal yang dapat dijadikan indikator. Namun pada umumnya dalam mengukur pertumbuhan agregat suatu negara, langkah pertama adalah menentukan besaran *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat pertumbuhan tahunannya.⁸⁷ Selain itu penting juga untuk mengukur perbandingan akumulasi kapital dengan jumlah populasi negara tersebut⁸⁸, dengan kata lain melakukan pengukuran PDB per kapita. Pengukuran PDB per kapita menjadi penting karena hal tersebut menggambarkan tingkat perkembangan internal suatu negara.⁸⁹

Sedangkan untuk memastikan kekuatan militer suatu negara secara sederhana dapat dianalisa dengan mengukur dari jumlah personil militer per negara dan juga belanja militer negara tersebut.⁹⁰ Anggaran pertahanan (*defence budget*) sebuah negara dapat dianalisa melalui berbagai cara, namun suatu analisa yang fokus terhadap pemahaman karakter kapabilitas militer adalah dengan cara mengukur besarnya alokasi anggaran tersebut⁹¹, dan pada umumnya alokasi anggaran pertahanan dilihat dari perbandingan terhadap total GDP suatu negara.⁹²

Berikutnya adalah personil militer (*man power*). Jumlah dan kualitas dari personil militer merupakan sumber daya kedua yang menjadi indikator kekuatan suatu negara setelah anggaran pertahanan. Pengukuran kekuatan militer yang memusatkan pada jumlah personil secara keseluruhan, terbagi atas tentara aktif

⁸⁷ Ashley J. Tellis, dkk, *Op. cit.*, hal. 16.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Lihat Thomas W. Smith, *History and International Relations*, London & New York: Routledge, 1999, hal. 135.

⁹¹ Lihat Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne dan Melissa McPherson, *Op. cit.*, hal. 137.

⁹² *Ibid.*, hal. 136.

dan tentara cadangan.⁹³ Negara dengan kekayaan ekonomi yang tinggi dan kekuatan militer yang besar akan terlihat lebih mengancam.

3.1.1 Bidang Ekonomi

Melihat perekonomian negara-negara di Asia Tenggara, tidak terlepas dari pengaruh krisis finansial yang melanda kawasan tersebut khususnya Krisis Asia pada tahun 1997-1999. Masing-masing negara berusaha untuk bangkit memperbaiki ekonominya kembali dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi perekonomian Indonesia masih saja tetap belum normal, bahkan cukup terpukul akibat imbas dari krisis tersebut, hingga saat ini masih terasa dampaknya. Indonesia 'kalah cepat' perkembangan antisipasi hubungan ekonominya dibandingkan dengan beberapa negara anggota ASEAN (Singapore, Thailand, dan Malaysia).⁹⁴

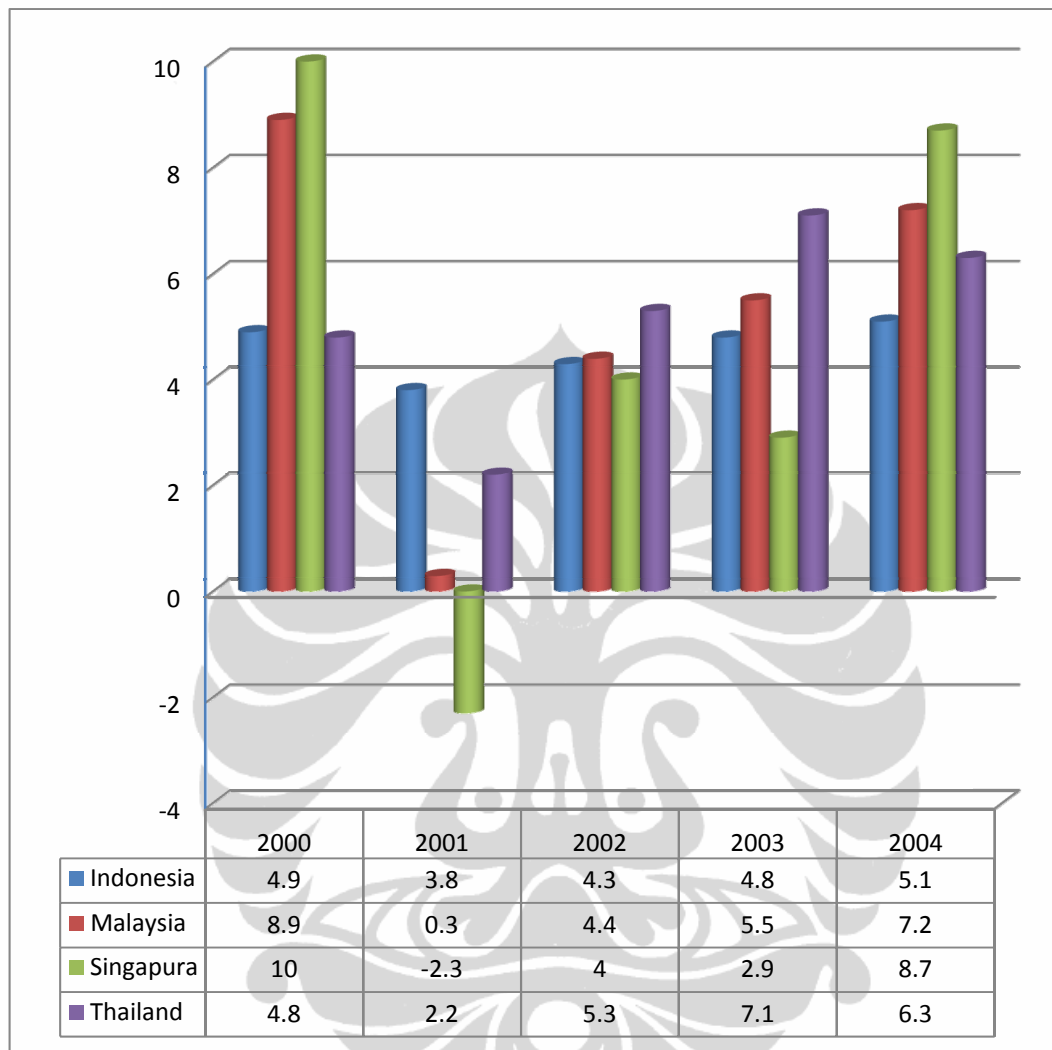
Bila melihat perbandingan persentase pertumbuhan ekonomi dalam PDB antara tahun 2000 hingga tahun 2004 (Lihat Grafik 3.1), Singapura dan Malaysia mengalami laju pertumbuhan di atas rata-rata negara Asia Tenggara lainnya, dimana pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Malaysia 8,9% dan Singapura 10%. Namun pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi mayoritas negara-negara Asia Tenggara mengalami perlambatan. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Asia Tenggara tetapi juga melanda dunia secara keseluruhan. Perekonomian dunia dalam keseluruhan tahun 2001 melambat, perlambatan hampir terjadi pada semua kelompok negara. *World Economic Report*, IMF, September 2001 memperkirakan, pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 2,6% jauh lebih rendah dari tahun 2000 yang mencapai 4,7%.⁹⁵

⁹³ Lihat Ashley J. Tellis, dkk, *Op. cit.*, hal. 30.

⁹⁴ Zainuddin Djafar, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur: Kajian Perspektif Ekonomi-Politik*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2008, hal. 37.

⁹⁵ Perkembangan Ekonomi Makro Sampai Dengan Bulan September 2001, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, h.1
diunduh dari <www.bappenas.go.id/get-file-server/node/1728/>

Grafik 3.1: Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (% PDB) Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand Tahun 2000-2004



Sumber: Diolah dari ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Unit (FMSU) Database, dalam ASEAN Statistical Yearbook 2006, Jakarta: The ASEAN Secretariat.

Melambatnya perekonomian dunia tahun 2001 ini antara lain disebabkan oleh menurunnya kepercayaan dunia usaha (dimulai dari AS kemudian meluas ke Eropa) didorong oleh menurunnya investasi di bidang teknologi informasi.⁹⁶ Selain hal tersebut, yang turut memberikan pengaruh terhadap melambatnya perekonomian adalah serangan 11 September 2001 terhadap gedung World Trade Center (WTC) di New York. Gejolak pada pasar modal New York tersebut

⁹⁶ Perkembangan Ekonomi Makro Sampai Dengan Bulan September 2001, *Ibid*, h. 2.

memberi pengaruh menjalar pada pasar modal di berbagai negara, di akhir September 2001, indeks saham Singapura dan Malaysia turun berkisar antara 9-12%.⁹⁷

Sebagaimana yang terlihat dalam Grafik 3.1 pertumbuhan ekonomi Singapura sangat terkena dampak dari perlambatan ekonomi dunia hingga menyentuh -2,3%. Hal tersebut terjadi karena perekonomian Singapura sangat bergantung dengan perdagangan. Hal ini membuat Singapura sangat sensitif dengan negara-negara maju yang selama ini menjadi mitra dagangnya yakni Amerika dan Eropa. Karena dua kawasan itu terkena krisis, maka Singapura pun terkena dampaknya.⁹⁸ Namun di mulai tahun 2002 dan seterusnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand mulai meningkat secara perlahan.

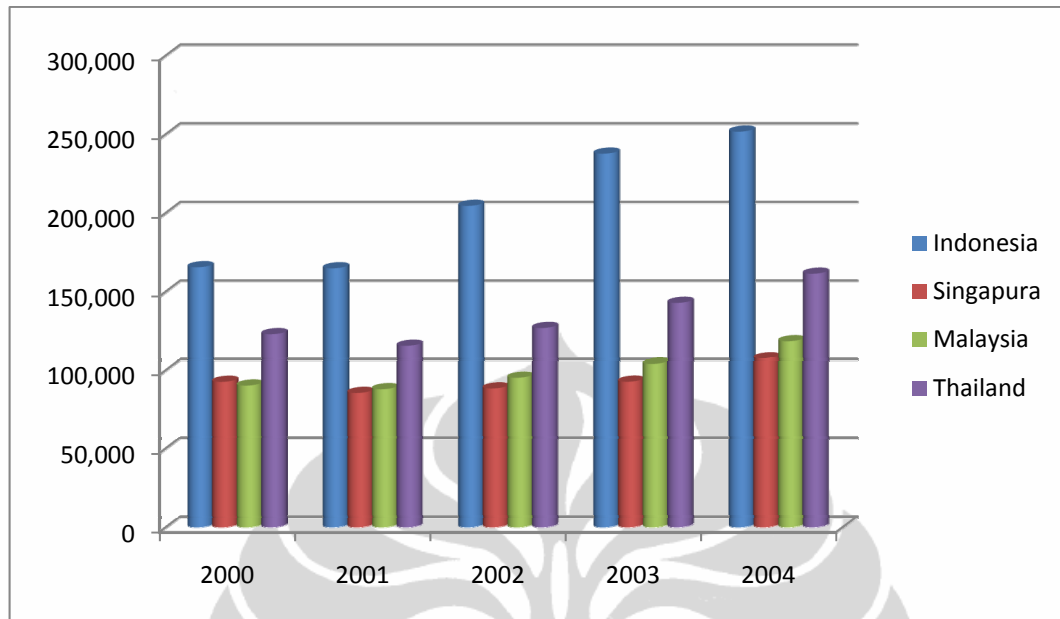
Selain melihat pada persentase pertumbuhan perekonomiannya, untuk lebih jelas melihat kondisi ekonomi suatu negara dapat dilihat dari perbandingan PDB nominal masing-masing negara. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Dalam Grafik 3.2 diperlihatkan bahwa Indonesia memiliki PDB paling tinggi diantara negara besar di Asia Tenggara dalam periode 2000 hingga 2004, dengan rata-rata sebesar 260.874,6 juta dolar AS.

⁹⁷Perkembangan Ekonomi Makro Sampai Dengan Bulan September 2001, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, h.2.

diunduh dari www.bappenas.go.id/get-file-server/node/1728/

⁹⁸ Singapore Forum, "Ekonomi Singapura Akan Hancur!", diunduh dari <http://www.topix.com/forum/world/singapore/TFQ7O0ENPBSMBTFSS>

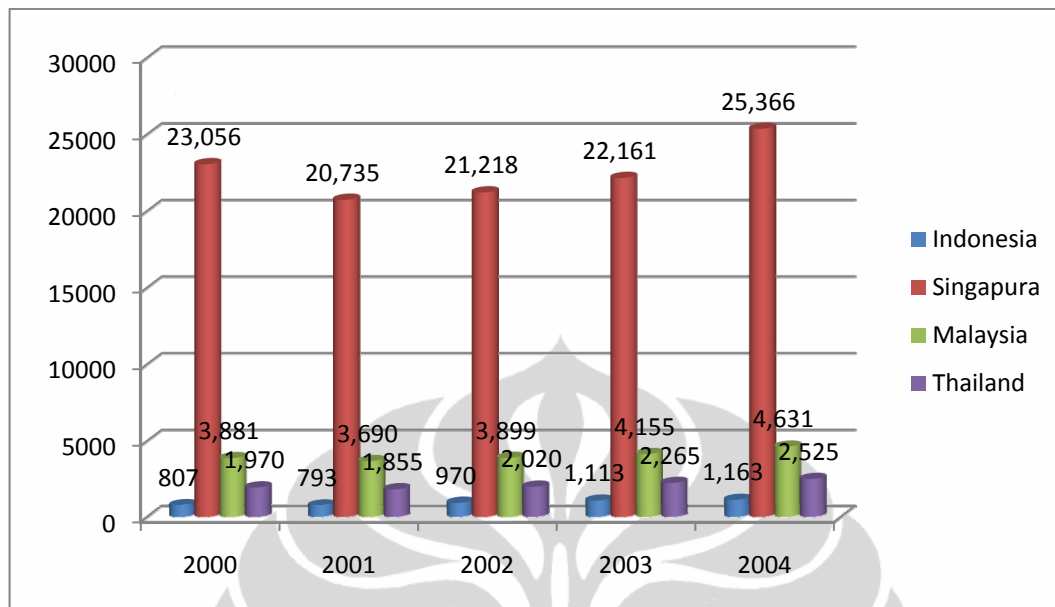
Grafik 3.2: PDB Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand Tahun 2000-2004 (dalam Juta Dolar AS)



Sumber: Diolah dari ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Unit (FMSU) Database, dalam ASEAN Statistical Yearbook 2006, Jakarta: The ASEAN Secretariat.

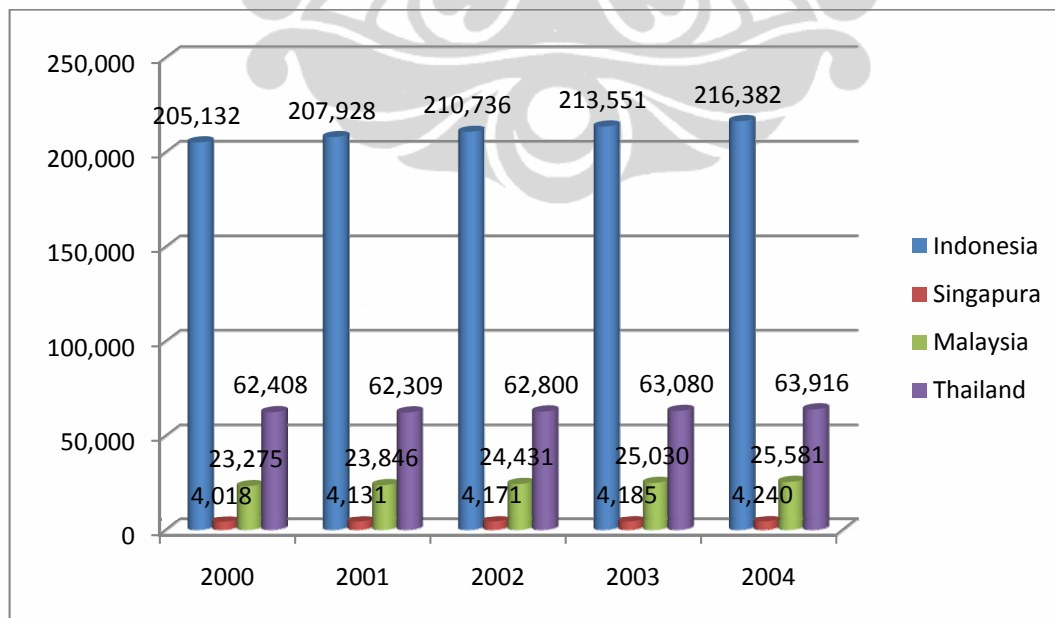
Walaupun dalam PDB nominal Indonesia berada pada urutan teratas, namun hal tersebut tidak menjamin pendapatan perkapitanya juga tinggi. Dalam Grafik 3.3 dapat dilihat bahwa PDB per kapita untuk tahun 2000 hingga 2004, Indonesia berada pada posisi paling rendah bila dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di Asia Tenggara. Dimana yang menempati urutan tertinggi adalah Singapura yang diikuti oleh Malaysia dan Thailand. Rata-rata PDB per Kapita Singapura sebesar 22507,2 dolar AS. Sedangkan Indonesia hanya memiliki rata-rata PDB per Kapita sebesar 969,2 dolar AS. Hal ini terjadi karena faktor jumlah penduduk yang sangat menentukan tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Perbandingan jumlah penduduk antara Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand dapat dilihat pada Grafik 3.4.

Grafik 3.3: PDB per Kapita Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand Tahun 2000-2004 (dalam Dolar AS)



Sumber: Diolah dari ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Unit (FMSU) Database, dalam ASEAN Statistical Yearbook 2006, Jakarta: The ASEAN Secretariat.

Grafik 3.4: Penduduk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand 2000-2004 (Estimasi Nasional, dalam ribuan)



Sumber: Diolah dari ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Unit (FMSU) Database, dalam ASEAN Statistical Yearbook 2006, Jakarta: The ASEAN Secretariat.

Dari data-data yang tertera di atas menunjukkan bahwa *aggregate capabilities* negara-negara lain dalam bidang ekonomi pada umumnya melebihi kemampuan Indonesia. Walaupun dalam GDP nominal Indonesia berada pada tingkatan teratas dalam grafik, namun jumlah nominal tersebut tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki jumlah rata-rata penduduk di atas 200 juta jiwa. Secara keseluruhan perekonomian yang paling menonjol adalah Singapura dengan GDP per Kapita tertinggi di Asia Tenggara.

3.1.2 Bidang Militer

Untuk melihat bagaimana kekuatan militer negara lain, khususnya negara tetangga suatu negara (baca: Indonesia) apakah mengancam atau tidak, kita dapat mengukurnya dengan melihat jumlah dan komposisi kekuatan bersenjata atau *manpower* suatu negara, serta dengan melihat belanja militernya. Apakah secara kuantitatif jauh lebih besar dari Indonesia atau tidak? Jika memang terbukti secara kuantitatif personel dan belanja militer negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand jauh lebih tinggi dan lebih berkualitas, maka seharusnya Indonesia merasa terancam dengan kekuatan militer negara tetangganya tersebut.

3.1.2 a. Military Personnel

Personil militer atau *Man Power* adalah salah satu elemen utama untuk melihat serta mengukur kemampuan militer suatu negara. Secara tradisional, tentara adalah salah satu kekuatan nasional negara (*instrument of national power*), disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer.⁹⁹ Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat jumlah angkatan bersenjata yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam Tabel 3.1 dapat dilihat perimbangan kekuatan militer negara-negara utama di Asia Tenggara dari sisi jumlah personil militer per matra. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat karakter strategi yang hampir sama diantara negara-negara utama di Asia Tenggara bila dilihat dari jumlah personil. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah personil *Army* atau Angkatan Darat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan matra lainnya, dengan demikian berarti keempat negara ini lebih mengandalkan personil

⁹⁹ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, *Op. cit.*, hal. 8.

Angkatan Darat dibandingkan dengan Angkatan matra lainnya. Bila dilihat dari total keseluruhan secara kuantitatif, maka Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan jumlah personel militer terbanyak. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan jumlah personel terbanyak di Asia Tenggara, Indonesia sudah memenuhi kebutuhan pertahanannya? Tentunya bila dilihat dari wilayah yang sangat luas, karakter geografi lebih didominasi oleh perairan dan potensi ancaman yang bersifat multidimensi maka hal tersebut masih dirasa kurang cukup.

**Tabel 3.1: Man Power Indonesia, Singapura, Malaysia & Thailand
Tahun 2000-2004**

Man Power 2000				
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Army	230000	50000	80000	190000
Navy	40000	4500	8000	68000
Marine	13000	0	0	18000
Air Force	27000	6000	8000	43000
Total	310000	60500	96000	319000
Man Power 2001				
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Army	230000	50000	80000	190000
Navy	40000	4500	12500	68000
Marine	12000	0	0	18000
Air Force	27000	6000	8000	48000
Total	309000	60500	100500	324000
Man Power 2002				
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Army	230000	50000	80000	190000
Navy	40000	4500	12000	68000
Marine	12000	0	0	18000
Air Force	27000	6000	8000	48000
Total	309000	60500	100000	324000
Man Power 2003				
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Army	230000	50000	80000	190000
Navy	45000	9000	14000	79200
Marine	15000	0	0	19700
Air Force	27000	13500	10000	45000

Total	317000	72500	104000	333900
Man Power 2004				
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Army	233000	50000	80000	190000
Navy	45000	9000	15000	70600
Marine	15000	0	0	23000
Air Force	24000	13500	15000	46000
Total	317000	72500	110000	329600

Sumber: Diolah dari *Military Balance 2000-2004*, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

Melihat perbandingan jumlah *man power* negara-negara utama di Asia Tenggara berdasarkan *active forces* dan *reserve forces* tahun 2000 hingga 2004 cukup beragam. Untuk Singapura dan Malaysia terlihat menaik terus secara kuantitatif jumlah personel mereka di setiap mata tiap tahunnya. Namun hal tersebut tidak terjadi pada Indonesia dan Thailand, jumlah *man power* Thailand dari tahun ke tahun lebih dinamis dimana terdapat penambahan maupun pengurangan dalam jumlah personel, sedangkan Indonesia cenderung stagnan yang berkisar di angka 700 ribuan. (Lihat Tabel 3.2 dan Grafik 3.5)

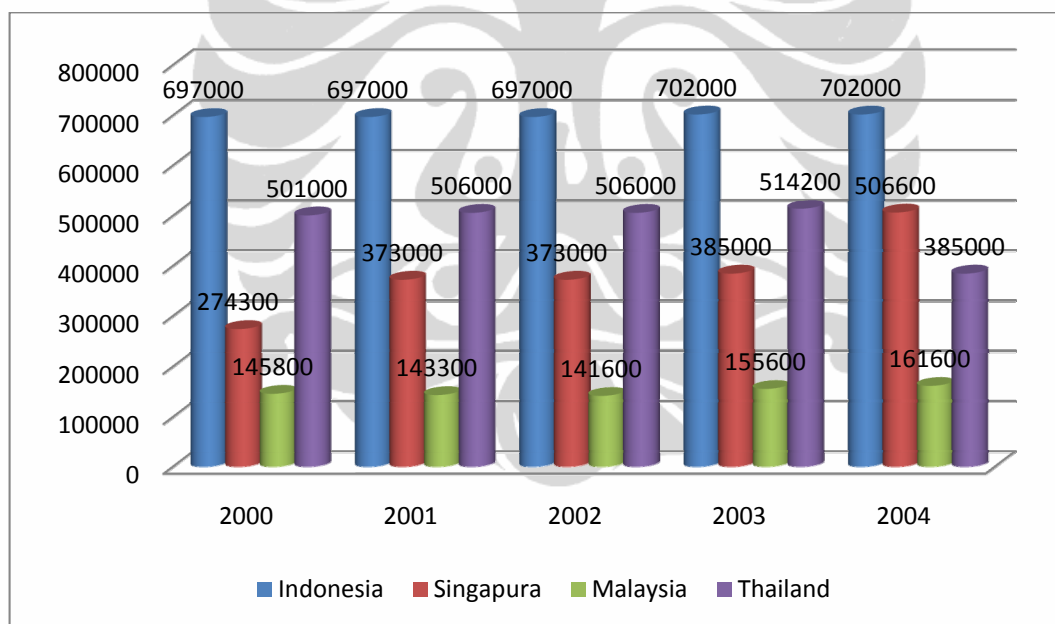
Tabel 3.2: Active Forces dan Reserve Forces Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand 2000-2004

Man Power 2000				
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Active Forces	297000	60500	96000	301000
Reserve Forces	400000	213800	49800	200000
Total	697000	274300	145800	501000
Man Power 2001				
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Active Forces	297000	60500	100500	306000
Reserve Forces	400000	312500	42800	200000
Total	697000	373000	143300	506000
Man Power 2002				
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Active Forces	297000	60500	100000	306000
Reserve Forces	400000	312500	41600	200000

Total	697000	373000	141600	506000
Man Power 2003				
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Active Forces	302000	72500	104000	314200
Reserve Forces	400000	312500	51600	200000
Total	702000	385000	155600	514200
Man Power 2004				
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Active Forces	302000	306600	110000	72500
Reserve Forces	400000	200000	51600	312500
Total	702000	506600	161600	385000

Sumber: Diolah dari *Military Balance 2000-2004*, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

Grafik 3.5: Jumlah Man Power Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand Tahun 2000-2004



Sumber: Diolah dari *Military Balance 2000-2004*, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

Jika dibandingkan secara kuantitatif, *Man Power* yang dimiliki oleh Indonesia memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Namun hal tersebut akan berbanding terbalik ketika dihitung berdasarkan persentase jumlah personel dari jumlah penduduk negara masing-

masing secara keseluruhan. Strategi pertahanan yang diterapkan di banyak negara, umumnya mengacu pada formulasi bahwa jumlah personel militer yang ideal kira-kira satu persen dari total jumlah penduduk.¹⁰⁰ Jadi, bila Indonesia ini berpenduduk 230 juta jiwa, maka jumlah tentara yang ideal menurut teori ini adalah 2,3 juta orang.¹⁰¹ Ukuran persentase tersebut sebenarnya bukanlah sebuah rumus yang mutlak harus diterapkan oleh suatu negara, khususnya karena berbagai faktor dan pertimbangan-pertimbangan lain.

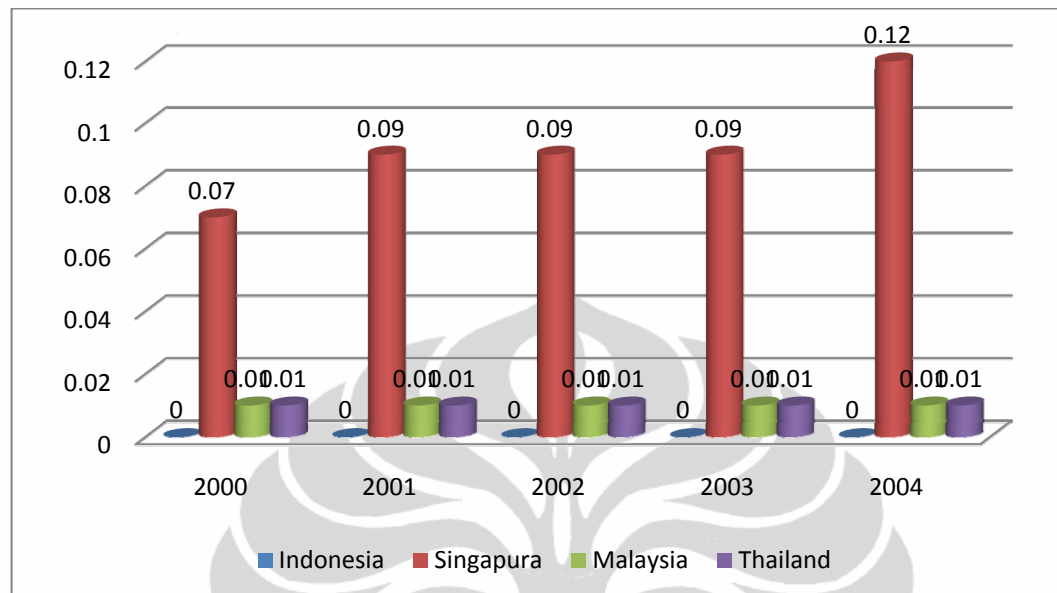
Diantara berbagai pertimbangan yang ada, potensi ancaman adalah salah satu alasan yang paling dominan dalam menentukan jumlah kekuatan personel militer. Membicarakan mengenai potensi ancaman tentunya tidak terlepas dengan persepsi Indonesia melihat ancaman yang ada. Hal tersebut akan di bahas dalam subbab *perception of intentions*.

Grafik 3.6 memperlihatkan bahwa jumlah personil Indonesia sangatlah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang begitu banyak. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase jumlah personil 0% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa. Untuk Malaysia dan Thailand rata-rata persentase setiap tahunnya adalah 0,01%. Sedangkan yang paling tinggi persentasenya diantara keempat negara tersebut adalah Singapura dengan rata-rata persentase jumlah personil 0,09% dari jumlah penduduknya.

¹⁰⁰ Yusron Ihza, *Tragedi & Strategi Pertahanan Nasional*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009, hal. 112.

¹⁰¹ *Ibid.*

Grafik 3.6 : Persentase Jumlah Personil dari Jumlah Penduduk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand Tahun 2000-2004



Sumber: Diolah dari *Military Balance 2000-2004*, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies; *Populasi ASEAN Statistical Yearbook 2006*.

Secara keseluruhan jumlah kekuatan TNI tersebut belum memenuhi jumlah kebutuhan berdasarkan Tabel Organisasi dan Perlengkapan atau Daftar Susunan Personel dan Peralatan TOP/DSPP. Proses rekrutmen yang diselenggarakan secara periodik selama ini belum mampu sepenuhnya menutupi penyusutan jumlah personel yang pension, meninggal/gugur atau karena alasan lain. Begitu pun dari segi kualitas, dikarenakan terbatasnya anggaran pendidikan dan latihan. Sisi lain yang mempengaruhi kualitas personel adalah tingkat kesejahteraan prajurit yang masih rendah, bahkan bila diukur dari standar kebutuhan minimal sekalipun, secara rata-rata masih berada di bawah standar.¹⁰²

3.1.2 b. Military Expenditures

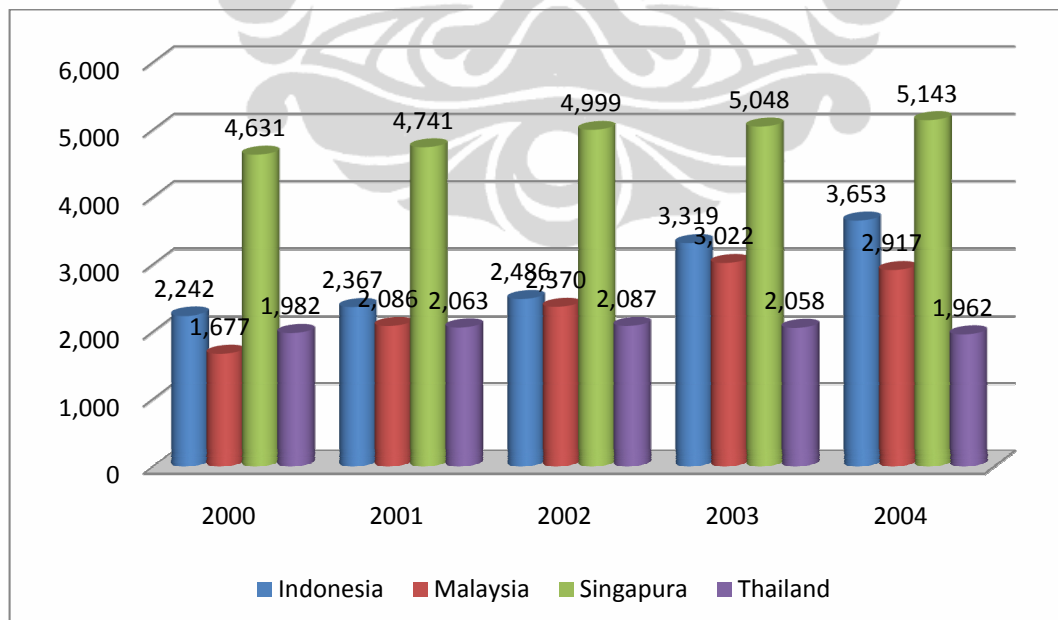
Dalam memastikan kekuatan militer suatu negara, selain melakukan pengukuran dari jumlah personel militer terdapat indikator lain yang dapat digunakan yaitu dengan melihat belanja militer atau pertahanan negara tersebut.

¹⁰² Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, *Op. cit.* hal. 102.

Negara dengan belanja pertahanan atau alokasi anggaran pertahanan lebih besar atau di atas rata-rata normal maka secara otomatis memiliki indikasi kekuatan militer yang besar. Negara yang memiliki indikasi kekuatan militer yang besar tersebut tentunya akan terlihat lebih mengancam dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki belanja pertahanan atau alokasi anggaran pertahanan yang relatif kecil.

Grafik 3.7 menggambarkan perbandingan belanja militer atau pertahanan antara empat negara-negara utama di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand dalam periode tahun 2000 hingga 2004. Secara signifikan yang memiliki belanja militer tertinggi dibandingkan dengan keempat negara tersebut adalah Singapura dengan rata-rata US\$4912.4. Sedangkan Indonesia berada pada urutan kedua dengan rata-rata belanja militer US\$2813.4. Dan diurutkan berikutnya ada Malaysia dan Thailand dengan masing rata-rata belanja militer US\$2414.4 dan US\$2030.4.

Grafik 3.7: Belanja Militer Indonesia, Singapura, Malaysia & Thailand Tahun 2000-2004 (dalam Milyar Dolar)

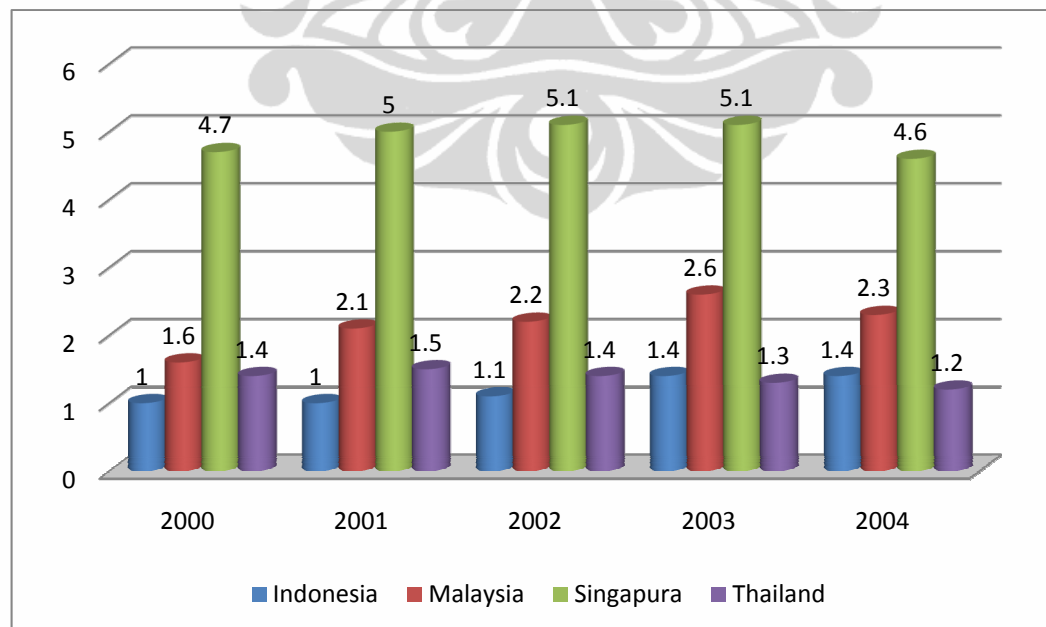


Sumber: Diolah dari The SIPRI Military Expenditure Database, diunduh dari <http://milexdata.sipri.org/result.php4>

Bila dibandingkan dalam besaran belanja pertahanan dengan beberapa negara ASEAN (Singapura, Malaysia dan Thailand), tampaknya anggaran pertahanan Indonesia cukup besar dengan posisi dalam urutan kedua setelah Singapura. Selain itu juga tampak adanya kenaikan anggaran pertahanan Indonesia dari tahun ke tahun. Namun tingkat persentase kenaikan anggaran pertahanan per tahun sama sekali belum memberikan pengaruh terhadap kondisi kekuatan pertahanan Indonesia. Bahkan tingkat kenaikan anggaran tersebut belum mampu mengimbangi anggaran pertahanan negara-negara di kawasan.

Bila dilihat dari sisi persentase PDB, anggaran pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang pada umumnya telah melampaui 2% PDB, maka anggaran pertahanan Indonesia yang masih sekitar 1% PDB ternyata masih jauh lebih kecil dari negara-negara tersebut. Bahkan Singapura memiliki rata-rata persentase alokasi anggaran pertahanan mencapai 5% dari PDB-nya. (Lihat Grafik 3.6)

Grafik 3.8: Alokasi Anggaran Pertahanan Indonesia, Singapura, Malaysia & Thailand Dari GDP Tahun 2000-2004



Sumber: Diolah dari The SIPRI Military Expenditure Database, diunduh dari <http://milexdata.sipri.org/result.php4>

Kondisi tersebut menjadi penghalang bagi pertahanan Indonesia untuk mengembangkan kapabilitas militernya. Keterbatasan dukungan alokasi anggaran pertahanan ini membuat Indonesia hingga saat ini belum mampu melakukan fungsi perimbangan kekuatan militer dalam kawasan.

3.2. Geography

Dalam setiap pembahasan mengenai pertahanan suatu negara terdapat suatu hal yang tidak dapat dihindari yaitu faktor geografi. Kondisi geografi suatu negara memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kebijakan pertahanan serta strategi pembangunan kekuatan militer negara tersebut. Letak wilayah dan segala dimensinya menjadi penentu kekuatan militer dan kekuatan politik negara tersebut. Tidak terkecuali dengan Indonesia, secara normatif kondisi geografi Indonesia turut menentukan pembuatan kebijakan pertahanan Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Bab II: Hakikat, Dasar, Tujuan dan Fungsi Pasal 3 (2), berbunyi “Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”.¹⁰³ Selain dalam undang-undang, ketentuan tersebut juga termuat dalam Buku Putih Pertahanan Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “penentuan kebijakan pembangunan pertahanan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografi, sumber kekayaan alam dan buatan, serta kondisi sosial”.¹⁰⁴

Dalam kaitannya dengan anggaran pertahanan, geografi dengan segala dimensinya berfungsi sebagai salah satu indikator dalam menentukan apakah suatu negara merasa aman atau tidak. Peter A. Toma dan Robert F. Gorman menjelaskan geografi sebagai karakteristik dari determinan perilaku negara-bangsa yang terbagi menjadi empat indikator yaitu *size*, *location*, *topography*, dan *climate*.¹⁰⁵ Apabila setelah dilakukan analisa bahwa secara geografis Indonesia berada dalam posisi tidak aman, dikarenakan banyak sekali potensi munculnya ancaman yang mengganggu keutuhan nasional, maka secara normatif Indonesia

¹⁰³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

¹⁰⁴ Buku Putih Pertahanan Indonesia, Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, *Op. cit.* hal. 18.

¹⁰⁵ Lihat Peter A. Toma dan Robert F. Gorman, *Loc. cit.*

akan menaikkan alokasi anggaran pertahanannya minimal untuk menyeimbangi anggaran pertahanan negara-negara tetangga yang berada dalam kawasan Asia Tenggara.

Sepertinya tidak ada negara di dunia yang memiliki kompleksitas geografis dan sosial-budaya seperti Indonesia. Dengan wilayah yang terbentang mulai dari 92° BT - 141° BT dan 7°20' LU - 14° LS, Indonesia terdiri dari 18.000 pulau. Dengan wilayah lebih dari 5 juta kilometer persegi, 62% diantaranya berupa lautan, termasuk separuh diantaranya merupakan kawasan ekonomi eksklusif. Indonesia memiliki 81.000 km garis pantai dan sekitar 2.800 km perbatasan darat (dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor-Timur).¹⁰⁶ Indonesia terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) dan memiliki 4 dari 9 *choke point* yang berada di seluruh dunia.¹⁰⁷

Secara geografis, Indonesia berdampingan dengan sejumlah negara, baik sesama anggota ASEAN maupun di luar ASEAN. Dalam hubungan kepentingan karena posisi geografis yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, stabilitas keamanan di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia menjadi prioritas perhatian Indonesia. Kerawanan konflik akibat pergesekan isu perbatasan yang terdiri dari perbatasan darat dan perbatasan laut sangat tinggi. Wilayah darat dan laut kita berhimpitan dengan batas kedaulatan 10 negara sekaligus: Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.¹⁰⁸

Di sebelah Utara, Indonesia berbatasan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dengan kondisi tersebut tentunya banyak sekali potensi konflik yang dihadapi oleh Indonesia terutama dalam hal klaim teritorial di wilayah perbatasan baik darat maupun laut. Belum tuntasnya penentuan garis batas suatu negara terhadap negara lain, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam dan kondisi geografi yang dapat menjadi sumber masalah Indonesia dengan

¹⁰⁶ Kusnanto Anggoro, "Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga dan Strategi Pertahanan Indonesia", dalam Bantarto Bandoro (ed.), *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, CSIS, 2005, h. 75.

¹⁰⁷ Sembilan Choke point tersebut adalah Selat Bab El Mandeb, Hormuz, Gibraltar, Suez, Terusan Panama, Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Ombai Wetar.

¹⁰⁸ Yusron Ihza, *Op. cit.*, hal. 116

negara-negara di ASEAN. Hal tersebut dapat dicontohkan dalam kasus perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia baik di wilayah perairan selat Malaka dan wilayah daratan di bagian utara pulau Kalimantan. Masalah perbatasan juga muncul antara Indonesia dengan Filipina, Thailand dan Vietnam serta Singapura khususnya dengan reklamasi pantai.

Sedangkan bila kita melihat di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Australia. Walaupun sudah terdapat perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Australia mengenai perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengacu pada perjanjian Indonesia-Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997, namun dengan adanya pemisahan Timor Timur dari bagian NKRI menjadi Timor Leste, maka penentuan batas yang baru antara RI-Australia di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan kembali secara trilateral agar tidak berkembang menjadi konflik. Disamping itu, bila melihat strategi pertahanan Australia memperlihatkan bahwa jangkauan yang dimiliki kekuatan militer Australia jauh melampaui wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Indonesia secara geografis harus terus waspada terhadap kekuatan militer Australia.

Di bagian timur Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan laut. Namun terdapat beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan kiam terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari. Selain hal tersebut juga ditambah dengan adanya masalah gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memanfaatkan wilayah PNG sebagai tempat untuk melarikan diri dan juga kegiatan pelintas batas juga sering terjadi secara tradisional oleh penduduk yang bermukim di dekat wilayah perbatasan.

Di bagian barat Indonesia terdapat India yang terhubung dengan wilayah perairan. Secara geografis perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia

dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan. Disamping permasalahan tersebut Indonesia harus tetap waspada terhadap upaya-upaya yang digunakan oleh India dalam rangka mengamankan jalur perdagangan negara tersebut, khususnya di wilayah perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Pengamanan di kedua wilayah strategis tersebut dapat berpotensi menjadi konflik baru.

Sedangkan di bagian tenggara Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Hingga kini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari ditambah lagi dengan adanya sentimen-sentimen masa lalu.

Tidak hanya ancaman konvensional yang harus dipertimbangkan secara geografis, namun juga dapat dilihat posisi Indonesia dalam kedudukan geostrategis di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia merupakan salah satu tempat rawan untuk terjadinya ancaman non-tradisional seperti perompakan, perdagangan gelap (senjata, narkoba dan obat bius, serta perempuan dan anak-anak), terorisme internasional dan atau terorisme maritim.

Meskipun tidak mengalami invasi konvensional secara besar-besaran, Indonesia juga harus tetap berhadapan dengan berbagai potensi konflik tradisional seperti separatis bersenjata, sengketa perbatasan, sabotase terhadap instalasi-instalasi strategis, perlindungan atas jalur laut dan perlindungan sumber daya¹⁰⁹. Perlu digaris bawahi bahwa ancaman-ancaman itu dapat berupa ancaman terhadap

¹⁰⁹ Kusnanto Anggoro, *Ibid.*

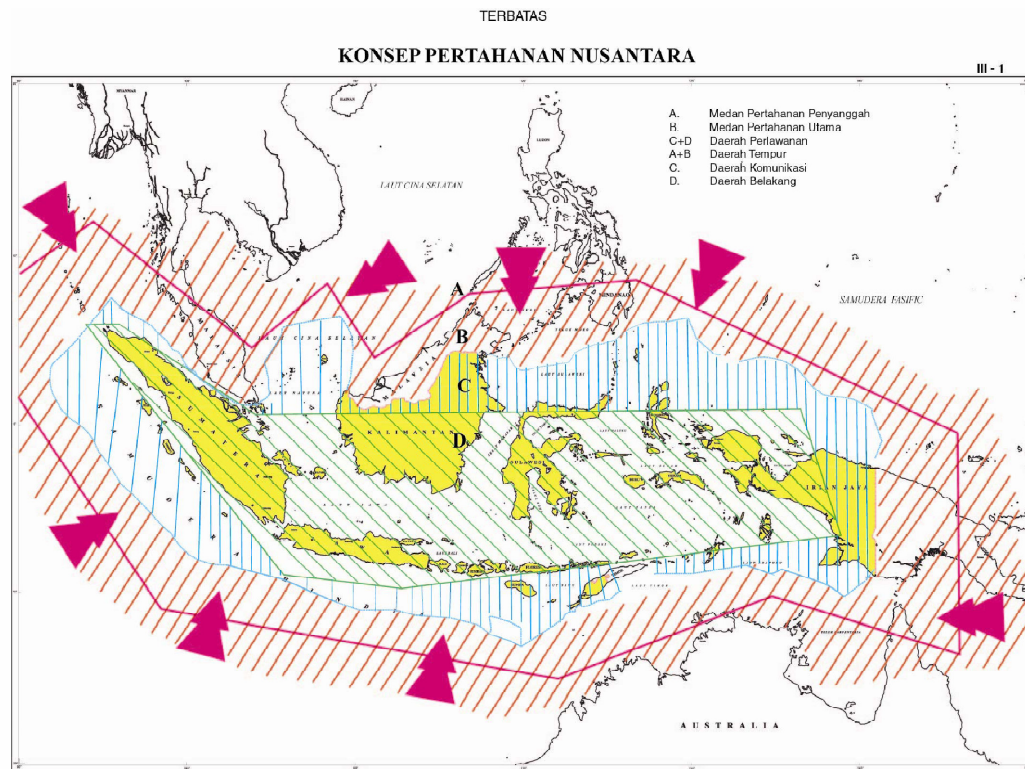
keutuhan wilayah, kedaulatan otoritas politik, keselamatan warga negara, dan/atau kombinasi dari mereka. Namun jarang muncul gagasan yang utuh.

Disamping perkiraan ancaman tersebut, terdapat dua hal lain yang juga menjadi bahan pertimbangan. Pertama, Indonesia masih menghadapi ancaman stabilitas geopolitik dan perlu senantiasa mempersiapkan diri terhadap bencana alam maupun buatan. Kedua, betapapun kecil kemungkinan, barangkali, Indonesia harus tetap memperhitungkan terjadinya perang modern, baik yang terjadi sebagai eskalasi memburuknya hubungan diplomatik maupun melulu karena aksiden.¹¹⁰ Di kelak kemudian hari, krisis minyak bumi atau gangguan terhadap jalur perdagangan internasional saja mungkin cukup menjadi alasan bagi suatu negara untuk menyerang negara lain.

Kondisi geografis Indonesia yang sangat vital ini memerlukan sebuah postur pertahanan yang mampu menggelar seluruh pola operasi dalam sebuah skenario gelar pertahanan berlapis (*layered defense*) yang mampu mencerminkan kemampuan Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Gambar 3.1 memperlihatkan gelar pertahanan berlapis (*layered defense*) untuk pola operasi laut nusantara yang ideal.

¹¹⁰ *Ibid*

Gambar 3.1: Strategi Pertahanan Nusantara



Sumber: Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

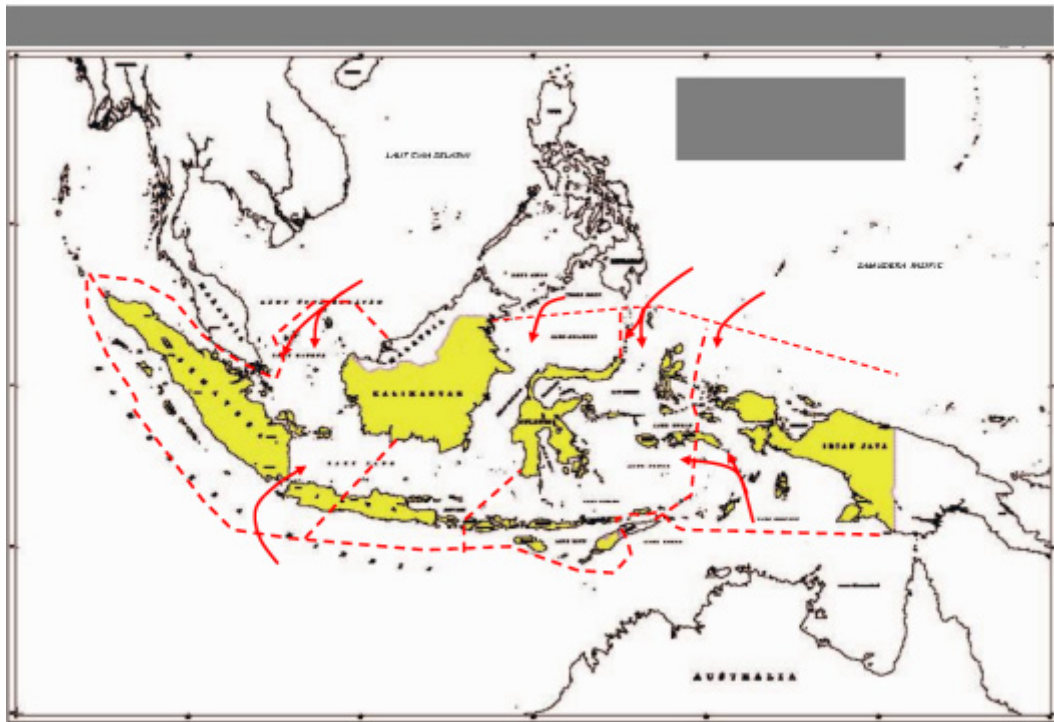
Di dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa strategi pertahanan berlapis (*layered defense*) terdiri dari beberapa wilayah, pertama, wilayah A merupakan medan pertahanan penyanggah yang berada di luar batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia hingga wilayah musuh. Kedua, wilayah B merupakan medan pertahanan utama yang meliputi wilayah antara garis pantai kepulauan Indonesia dan batas ZEE. Sedangkan untuk yang ketiga adalah wilayah C+D yang merupakan daerah perlawanan yang terdiri dari wilayah C yang merupakan daerah komunikasi dan wilayah D yang merupakan daerah belakang. Daerah perlawanan ini mencakup seluruh wilayah darat Indonesia namun diprioritaskan kepada pulau-pulau besar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun sangat disayangkan hingga saat ini Indonesia belum mampu melaksanakan operasi pertahanan berlapis seperti yang digambarkan di atas karena TNI belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menggelar operasi militer di wilayah A (medan pertahanan penyanggah) dan di wilayah B (medan pertahanan utama). Gelar operasi militer saat ini masih ditujukan untuk melakukan operasi militer di wilayah C+D (daerah perlawanan). Dengan demikian terdapat asumsi bahwa wilayah A dan wilayah B tidak dapat dipertahankan, lawan sudah berada di wilayah darat (C+D) dan ancaman yang dihadapi Indonesia bersifat internal.¹¹¹

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dua pertiga dari wilayahnya adalah perairan dan memiliki garis pantai 81.000 km serta wilayah ZEE seluas 4 juta kilometer persegi, menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jalur perlintasan mengingat fungsi laut sebagai jalur transportasi. Dengan kondisi tersebut wilayah perairan laut Indonesia menjadi bagian penting bagi masyarakat internasional yang menyebabkan keamanan laut di wilayah Indonesia membutuhkan sebuah operasi laut yang menunjang. Dengan adanya operasi laut yang komprehensif sesuai dengan kondisi geografis diharapkan mampu meminimalisir potensi ancaman bahkan menghadapi kemungkinan serangan musuh sekalipun. Dalam Gambar 3.2 diilustrasikan sebuah konsep penataan daerah operasi laut yang ideal bagi Indonesia.

¹¹¹ Lihat Andi Widjajanto, *Strategi Pertahanan Indonesia*, Universitas Indonesia.

Gambar 3.2: Penataan Daerah Operasi Laut



Sumber: Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Dengan luas wilayah 1.919.440 km²¹¹², Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara diantaranya dengan Samudra Hindia, Timor Leste, Australia, Papua New Guinea, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Ahli geografi politik Theodore Retzel sejak awal mengatakan bahwa “perbatasan” merupakan barometer bagi keselamatan suatu negara maupun dalam hubungannya dengan orang lain.¹¹³ Di dalam isu “tapalbatas” itu terletak berbagai persoalan tentang, misalnya, identitas, sumberdaya, dan kedaulatan dan, tentu saja, kemungkinan silang selisih antar entitas politik karena faktor-faktor itu.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2003, Indonesia memiliki begitu banyak isu perbatasan antar negara. Belum tuntasnya penentuan garis batas suatu negara terhadap negara lain dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan keduanya di masa

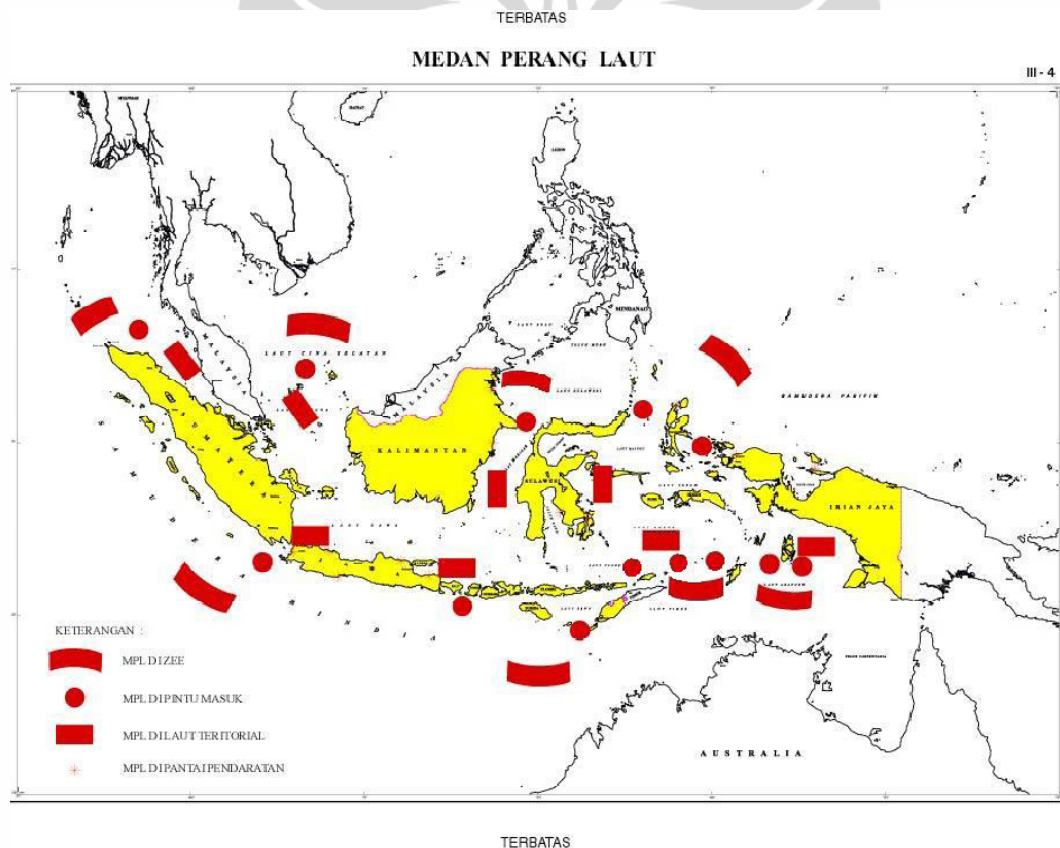
¹¹² ASEAN Selayang Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Edisi ke-17, 2007, hal. 6.

¹¹³ Kusananto Anggoro, *Op.cit.*, hal. 65.

mendatang. Di samping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam, dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antar negara.

Sebagai upaya mengantisipasi berbagai sumber masalah tersebut. Sebagai negara maritim Indonesia harus terus melakukan upaya modernisasi sistem persenjataanya di semua matra, khususnya bagi TNI Angkatan Laut. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya perang. Dengan merujuk pada konsepsi pertahanan nusantara maka dibutuhkan sebuah skema mengenai titik-titik terjadinya medan perang laut. Dalam Gambar 3.3 berikut diilustrasikan medan perang laut Indonesia.

Gambar 3.3: Medan Perang Laut



Sumber: Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Gambar tersebut menjelaskan bahwa medan perang Indonesia terbagi ke dalam empat zona yaitu, pertama, medan perang laut yang terkonsentrasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai zona pertempuran terdepan. Kedua, medan perang laut yang berpusat di pintu masuk wilayah perairan Indonesia. Ketiga, medan perang laut di wilayah laut territorial. Dan yang terakhir adalah medan perang laut di wilayah pantai daratan. Namun gelar pasukan TNI AL saat ini belum mengarah pada penyebaran pasukan untuk pemenuhan kebutuhan pasukan di setiap medan perang tersebut.

Dengan keadaan geografis tersebut Indonesia tidak memiliki alasan untuk merasa aman. Namun sepertinya bila melihat postur pertahanan yang selama ini diterapkan Indonesia merasa bahwa kondisi geografis yang relatif strategis serta ketiadaan ancaman eksternal yang serius dan serempak mengancam tiga komponen kedaulatan (wilayah, otoritas dan identitas negara) memberi rasa aman yang cukup besar. Hingga akhirnya kecemasan dan kekhawatiran yang ada tidak pernah mencapai titik yang dianggap memerlukan solusi yang sangat krusial demi keberlangsungan keutuhan pertahanan negara.

Seandainya Thucydides sempat mengenal Indonesia, mungkin penulis Perang Peloponnesos itu akan menulis: “ sebagai bangsa dan negara, Indonesia memiliki kepentingan dan kehormatan. Unsur lain yang tidak dimilikinya adalah ketakutan. Mereka bukan bangsa yang cinta damai, tetapi bangsa yang tidak mengenal diri dan lingkungannya.¹¹⁴ Dengan demikian tidak mengherankan jika pembangunan pertahanan Indonesia tidak diarahkan untuk merespon lingkungan eksternalnya, khususnya kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya pengembangan kapabilitas militer yang berupaya memposisikan diri sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan, kondisi ini lebih nyata lagi ketika kita melihat data alokasi anggaran pertahanan Indonesia yang dari tahun ke tahun stagnan di 1 persen PDB-knya. Tidak hanya itu dari sisi postur dan doktrin juga tidak mengalami perubahan yang berarti atau bersifat stagnan.

Dengan demikian dari uraian kondisi geografis Indonesia dan lingkungan sekitarnya, maka seharusnya Indonesia selalu merasa waspada dengan

¹¹⁴ *Ibid*, hal.79.

kemungkinan-kemungkinan terburuk. Seharusnya Indonesia lebih responsif dan reaktif terhadap kemungkinan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal Indonesia. Indonesia harus selalu siaga dalam menghadapi *unexpected military threat* khususnya yang datang dari negara yang mudah menjangkau Indonesia (negara tetangga).

3.3. Offense-Defense Balance

Dalam pembahasan kali ini akan dibahas mengenai *offense-defense balance* di Asia Tenggara. Untuk mengukurnya akan dibandingkan antara *cost of offense* dan *cost of defense*. Sebagaimana yang dikemukakan dalam tulisan Charles L. Glaser dan Chaim Kaufmann yang berjudul *What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure it?* dikemukakan bahwa

“offense-defense balance should be defined as the ratio of the cost of the forces that the attacker requires to take territory to the cost of the defender’s forces. This definition of the balance is especially useful because the offense-defense balance then provides an essential link between a state’s power and its military capability, that is, its ability to perform military missions”.¹¹⁵

Dengan kata lain *offense-defence balance* adalah perbandingan antara *cost of offense* dengan *cost of defence* beserta keuntungan yang mungkin akan diperoleh suatu negara ketika melakukan *offense* maupun *defense*. Dengan keadaan dunia politik internasional yang anarki negara berusaha mengevaluasi *landscape* militer secara hati-hati.

Offense-defense balance ini akan dijelaskan dengan menggunakan sampel empat negara utama di kawasan yaitu Indonesia, Singapura, Thailand dan Malaysia. Langkah pertama yang dilakukan adalah melihat perbandingan kekuatan diantara keempat negara tersebut berdasarkan tujuh kategori persenjataan PBB, yaitu: (1) tanks-tanks tempur (*battle tankss*), (2) kendaraan tempur yang dipersenjatai (*armored combat vehicles*), (3) sistem artileri caliber besar (*large-calibre artillery system*), (4) pesawat tempur (*combat aircraft*), (5) helikopter tempur (*attack helicopters*), (6) kapal perang: kapal-kapal atau kapal-kapal selam yang dilengkapi dengan penggunaan militer dengan *standard of*

¹¹⁵ Charles L. Glaser dan Chaim Kaufmann, *Loc. cit.*

displacement 750 metrik ton atau lebih dan kapal-kapal dengan *displacement* yang lebih rendah jika dilengkapi dengan peluncuran rudal dengan jangkauan serendahnya 25 kilometer atau torpedo dengan jangkauan sama, (7) rudal dan peluncur rudal: yang diarahkan atau tidak diarahkan roket, rudal balistik dan rudal kruise yang mampu mengirimkan *warhead* atau senjata penghancur dengan jangkauan jarak setidaknya-tidaknya 25 kilometer dan alat-alat yang dirancang atau dimodifikasi secara khusus untuk meluncurkan roket-roket atau rudal-rudal semacam itu.¹¹⁶ Perbandingan ini dilakukan hanya pada tahun 2004, hal tersebut dilakukan karena tidak ada perubahan jumlah yang berarti dari alutsista yang ada sejak tahun 2000 hingga tahun 2004. (Lihat Lampiran 1)

Setelah dilakukan perbandingan secara kuantitas antar kekuatan (*force to force ratio*) dengan negara tetangga, maka untuk langkah selanjutnya adalah mengukur dengan index di setiap masing-masing kategori. Pengukuran Index ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1:

$$I \text{ of-def} = \frac{\sum A_k}{N \text{ max kat}}$$

Keterangan:

I of-def = Index Offense-Defense

$\sum A_k$ = \sum Alutsista per kategori

N max kat = Nilai terbesar dari setiap kategori alutsista

Nilai Index Max = 1

Range Nilai Index Min = 0,01 - 0,99

¹¹⁶ Andi Widjajanto dan Makmur Keliat, *Op. cit.*, hal. 61.

Hasil pengukuran index kekuatan militer antara Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand terlihat dalam Lampiran 2. Dalam lampiran tersebut menunjukkan bahwa perimbangan kekuatan secara keseluruhan negara-negara di Asia Tenggara lebih didominasi oleh kendaraan tempur darat dibandingkan dengan kendaraan tempur udara dan laut. Dalam posisi ini, Indonesia berada di bawah Thailand, Singapura dan Malaysia. Dari kendaraan tempur darat yang ada, keempat negara tersebut lebih mengutamakan akuisisi kendaraan pengangkut personel dan light tanks. Seperti halnya Malaysia, Indonesia tidak melakukan akuisisi tank tempur utama sebagai andalan pertahanan artileri daratnya.

Dari Lampiran 2, dapat dibuat tabel yang lebih spesifik untuk memperlihatkan nilai index per matra. Dalam Tabel 3.3 di bawah ini sangat terlihat jelas bahwa pada umumnya proporsi ataupun komposisi matra darat lebih mendominasi dibandingkan dengan matra udara dan laut.

Tabel 3.3: Indeks Kekuatan Militer Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand Per Matra Tahun 2004

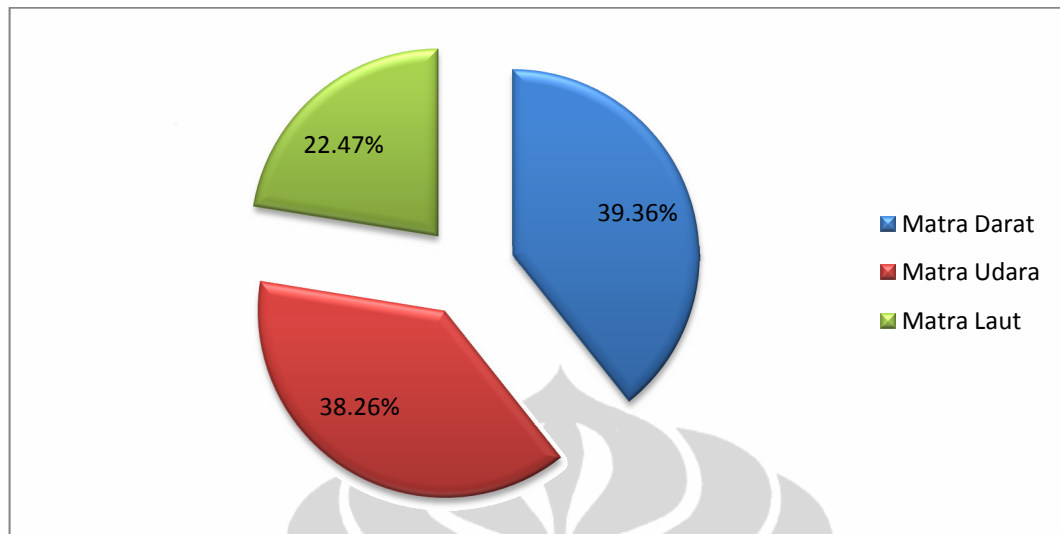
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand	
Battle Tank					AD
MBT	0	1	0	3	
Lt tank	3.18	1	0.17	3	
	3.18	2	0.17	6	
Armored Combat Vehicles					
AIFV	1.45	2	0	0	
AAV	0	0	0	1	
Assault Craft	0	0	1	0	
APC	8.21	4	5.29	2.09	
	9.66	6	6.29	3.09	
Large-Calibre Artillery System					
Towed Arty	4.27	5.32	2.37	7.36	
SP Arty	0	1	0	1	
MOR	2	2	0.29	2	
ATGW	0	2	4	1	
AD GUNS	2.85	1	1.75	6	
Mine	3	1	1	4	
	12.12	12.32	9.41	21.36	

Combat Aircraft					AU
Recce	4.6	2	3	2.38	
FGA	3.9	2.48	3	3	
Armed AC	0	0	0	3	
AEW	0	1	0	0	
STRIKE	0	0	0	2	
MR	3	0	1	0	
MPA	0	0	0	5	
SURV	0	1	0	2	
FTR	1	0	1	1	
Aircraft Carrier	0	0	0	1	
UAV	0	3	1	1	
	12.5	9.48	9	20.38	
Attack Helicopter					
Armed Hel	0	2	1	0	
Hel	7.67	3.95	3	2	
HELICOPTERS	4.03	0	0	8	
	11.7	5.95	4	10	
Warships (including Submarine)					AL
Submarine	1	1	0	0	
Frigate	5	0	3	7	
Corvette	1	1	2	2	
Missile Craft	1	1	2	2	
Torpedo Craft	1	0	0	0	
Patrol Craft	2	1	3.18	7.17	
Amphibious	3.25	1	1	2.57	
	14.25	5	11.18	20.74	

Sumber: Diolah dari *Military Balance* Tahun 2004, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

Grafik 3.9 menjelaskan bahwa Indonesia lebih di dominasi oleh kekuatan matra darat dengan persentase 39,36% dari total keseluruhan. Sedangkan untuk posisi kedua adalah matra udara dengan persentase 38,26% dan matra laut dengan persentase 22,47%. Proporsi matra tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan strategi Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Sebagai negara kepulauan idealnya proporsi kekuatan militer ini lebih didominasi oleh matra laut.

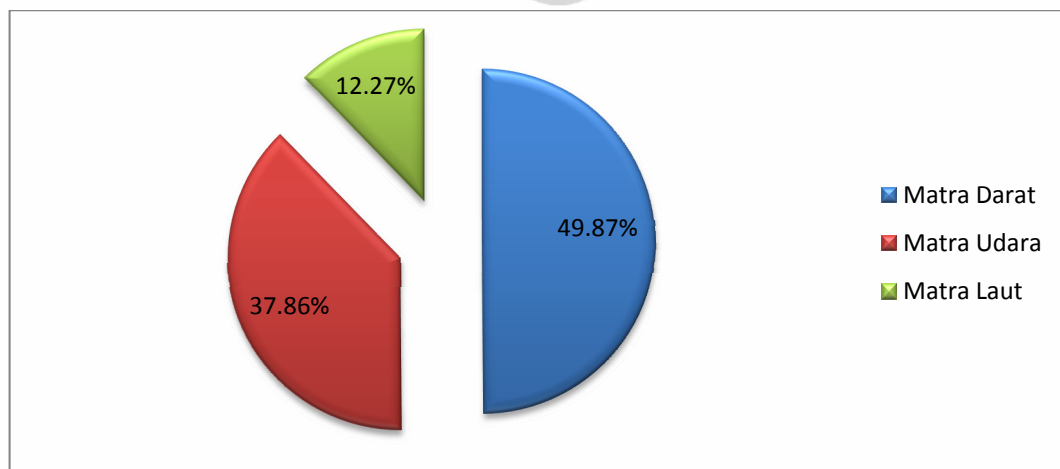
Grafik 3.9: Indeks Kekuatan Militer Indonesia Per Matra Tahun 2004



Sumber: Diolah dari Military Balance 2004, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

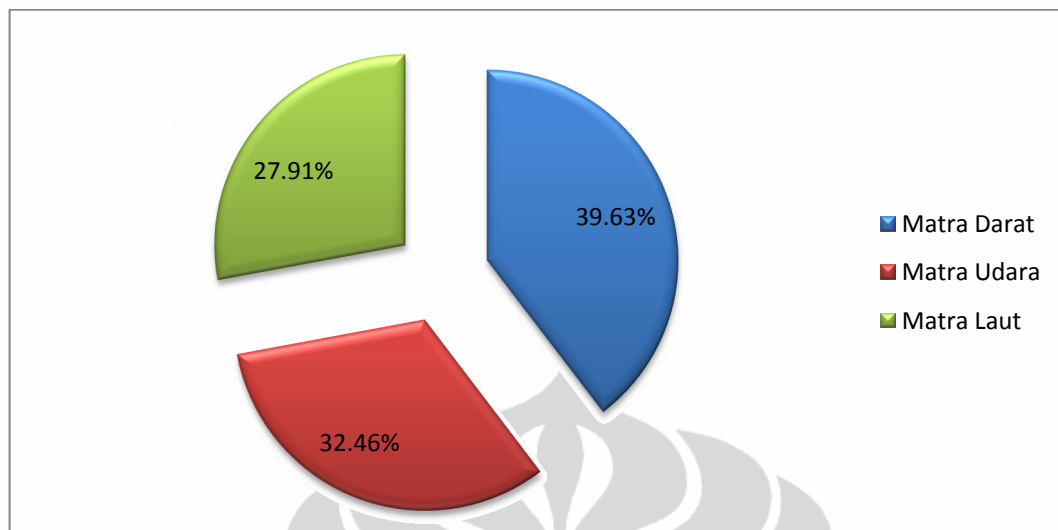
Grafik 3.10 menggambarkan bahwa kekuatan militer Singapura juga di dominasi oleh matra darat, dengan persentase hampir setengah dari total keseluruhan yaitu 49,87%. Sedangkan untuk matra udara sebesar 37,86% dan untuk matra laut hanya sebesar 12,27%. Dengan wilayah negara yang terkecil di Asia Tenggara, maka komposisi tersebut sesuai dengan kebutuhan pertahanan wilayahnya.

Grafik 3.10: Indeks Kekuatan Militer Singapura Per Matra Tahun 2004



Sumber: diolah dari Military Balance Tahun 2004, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

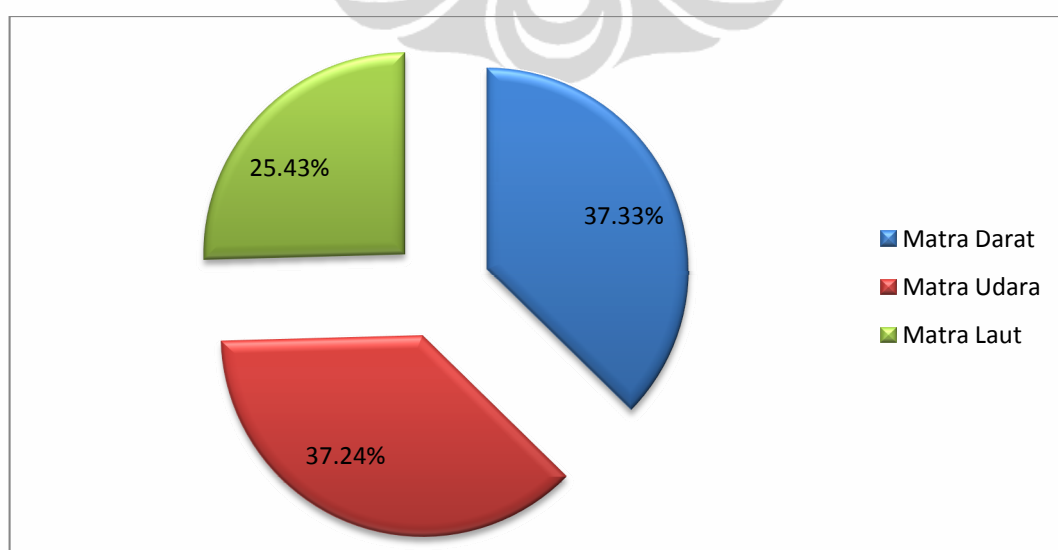
Grafik 3.11: Indeks Kekuatan Militer Malaysia Per Matra Tahun 2004



Sumber: diolah dari *Military Balance* Tahun 2004, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies

Pada Grafik 3.11 di atas memperlihatkan komposisi kekuatan militer Malaysia tahun 2004 dengan pembagian yang hampir seimbang di setiap matra. Walaupun matra darat paling besar komposisinya namun tidak begitu menciptakan kesenjangan yang terlalu jauh diantara matra lainnya. Matra darat Malaysia memiliki komposisi sebesar 39,63%, sedangkan untuk matra udara memiliki proporsi 32,46% dan untuk matra laut memiliki proporsi 27,91%.

Grafik 3.12: Indeks Kekuatan Militer Thailand Per Matra Tahun 2004



Sumber: diolah dari *Military Balance* Tahun 2004, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

Sedangkan untuk indeks kekuatan militer Thailand dapat dilihat di Tabel 3.12 di atas. Dari segi proporsi tersebut dapat dilihat bahwa kekuatan matra darat dan udara berimbang, proporsi matra darat sebesar 37,33% dan proporsi matra udara 37,24%. Sedangkan untuk proporsi matra laut adalah 25,43%.

Selanjutnya akan diperlihatkan kekuatan militer Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand berdasarkan karakteristik offense dan defense. Secara normatif apabila nilai offense-defense balance Indonesia rendah maka seharusnya Indonesia merespon dengan meningkatkan alokasi anggaran pertahanannya. Tabel 3.4 berikut ini akan memperlihatkan realita nilai index offense dan defense setiap kategori alutsista, yang diambil dari data lampiran 2.

Tabel 3.4: Index Kekuatan Militer Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand Berdasarkan Karakter Offense dan Defense Tahun 2004

	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand	Offense	Defense
Battle Tank						
MBT	0	1	0	3	√	
Lt tank	3.18	1	0.17	3	√	
Armored Combat Vehicles						
AIFV	1.45	2	0	0	√	
AAV	0	0	0	1	√	
Assault Craft	0	0	1	0	√	
APC	8.21	4	5.29	2.09	√	
Large-Calibre Artillery System						
Towed Arty	4.27	5.32	2.37	7.36		√
SP Arty	0	1	0	1		√
MOR	2	2	0.29	2	√	
ATGW	0	2	4	1		√
AD GUNS	2.85	1	1.75	6	√	
Mine	3	1	1	4		√
Combat Aircraft						
Recce	4.6	2	3	2.38		√
FGA	3.9	2.48	3	3	√	
Armed AC	0	0	0	3	√	
AEW	0	1	0	0	√	
STRIKE	0	0	0	2	√	
MR	3	0	1	0		√
MPA	0	0	0	5		√
SURV	0	1	0	2		√

FTR	1	0	1	1		√
Aircraft Carrier	0	0	0	1	√	
UAV	0	3	1	1		√
Attack Helicopter						
Armed Hel	0	2	1	0	√	
Hel	7.67	3.95	3	2	√	
HELICOPTERS	4.03	0	0	8	√	
Warships (including Submarine)						
Submarine	1	1	0	0	√	
Frigate	5	0	3	7	√	
Corvette	1	1	2	2	√	
Missile Craft	1	1	2	2		√
Torpedo Craft	1	0	0	0		√
Patrol Craft	2	1	3.18	7.17		√
Amphibious	3.25	1	1	2.57	√	
Missile and Missile Launcher						
RL	1	2	1	1		√
RCL	1.3	1.45	1.16	2		√
MRL	2	0	1	1		√
Missile	1.5	5	4	3.5	√	
SAM	1.23	3	3	4.03		√

Sumber: Diolah dari *Military Balance* Tahun 2004, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

Selanjutnya untuk memudahkan proses penghitungan maka dibuat tabel secara terpisah antara alutsista dengan kategori offense dan alutsista dengan kategori defense.

Tabel 3.5: Indeks Kekuatan Militer Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand Yang Berkarakter Offense Tahun 2004

Offense	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
MBT	0	1	0	3
Lt tank	3.18	1	0.17	3
AIFV	1.45	2	0	0
AAV	0	0	0	1
Assault Craft	0	0	1	0
APC	8.21	4	5.29	2.09
MOR	2	2	0.29	2
AD GUNS	2.85	1	1.75	6

FGA	3.9	2.48	3	3
Armed AC	0	0	0	3
AEW	0	1	0	0
STRIKE	0	0	0	2
Aircraft Carrier	0	0	0	1
Armed Hel	0	2	1	0
Hel	7.67	3.95	3	2
HELICOPTERS	4.03	0	0	8
Submarine	1	1	0	0
Frigate	5	0	3	7
Corvette	1	1	2	2
Amphibious	3.25	1	1	2.57
Missile	1.5	5	4	3.5
Total	45.04	28.43	25.5	51.16

Sumber: Diolah dari *Military Balance* Tahun 2004, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

Tabel 3.6: Indeks Kekuatan Militer Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand Yang Berkarakter Defense Tahun 2004

Defense	Indonesia	Singapore	Malaysia	Thailand
Towed Arty	4.27	5.32	2.37	7.36
SP Arty	0	1	0	1
ATGW	0	2	4	1
Mine	3	1	1	4
Recce	4.6	2	3	2.38
MR	3	0	1	0
MPA	0	0	0	5
SURV	0	1	0	2
FTR	1	0	1	1
UAV	0	3	1	1
Missile Craft	1	1	2	2
Torpedo Craft	1	0	0	0
Patrol Craft	2	1	3.18	7.17
RL	1	2	1	1
RCL	1.3	1.45	1.16	2
MRL	2	0	1	1
SAM	1.23	3	3	4.03
Total	25.4	23.77	24.71	41.94

Sumber: Diolah dari *Military Balance* Tahun 2004, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

Tabel 3.5 dan 3.6 menunjukkan bahwa nilai offense di kawasan Asia Tenggara lebih mendominasi dibandingkan dengan nilai defense. Secara keseluruhan rata-rata nilai offense dari keempat negara tersebut adalah 37,53 sedangkan untuk rata-rata nilai offense adalah 28,96. Nilai offense yang tertinggi dimiliki oleh Thailand yang melebihi rata-rata kawasan dengan nilai 51,16, sedangkan Indonesia berada pada posisi kedua dengan nilai offense 45,04. Untuk nilai defense nilai tertinggi juga dimiliki oleh Thailand dengan proporsi 41,94.

Setelah diketahui nilai offense dan nilai defense dari masing-masing negara maka selanjutnya kita akan menghitung nilai offense-defense balance. Cara yang digunakan untuk menghitung offense-defense balance adalah dengan menggunakan rumus berikut:

Rumus 2:

$$\text{Of-def B} = (\text{N.off}) - (\text{N.def})$$

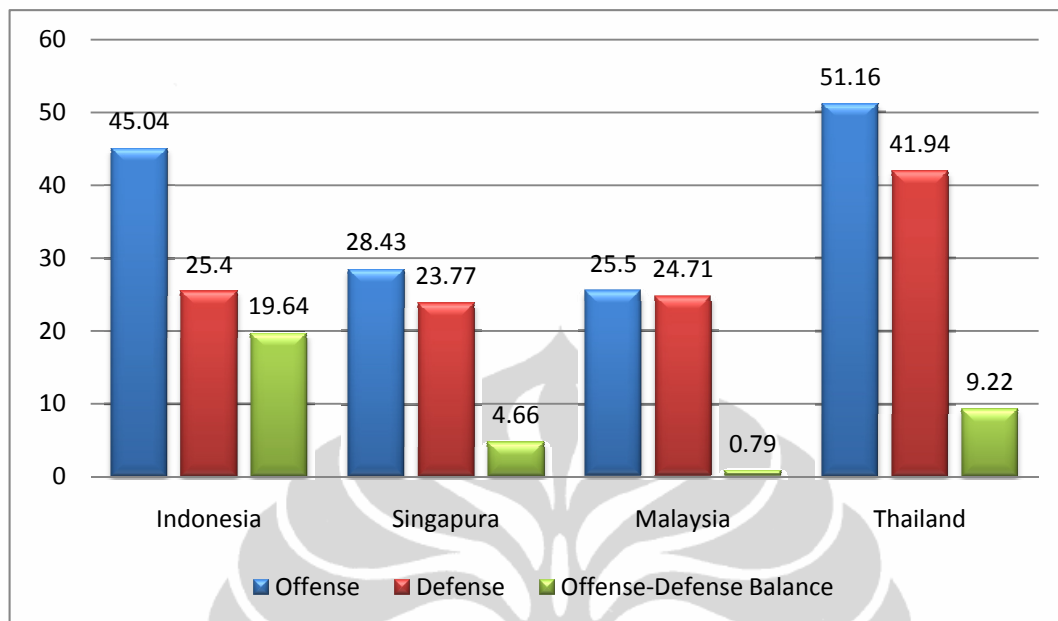
Keterangan:

Of-def B : Offense-defense Balance

N.off : nilai offense

N.def : nilai defense

Grafik 3.13: Nilai Indeks Offense-Defense Balance Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand Tahun 2004



Sumber: Diolah dari *Military Balance* Tahun 2004, London: Routledge dan International Institute for Strategic Studies.

Dengan demikian dengan rumus tersebut dapat ditentukan nilai offense-defense balance sebagaimana yang ditampilkan dalam Grafik 3.13. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa nilai *offense-defense balance* Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Untuk nilai *offense-defense balance* Indonesia sebesar 19,64, sedangkan untuk Thailand sebesar 9,22, Singapura sebesar 4,66 dan untuk Malaysia sebesar 0,79. Dengan demikian Indonesia memiliki kekuatan sebagai penyeimbang diantara kekuatan-kekuatan negara di kawasan Asia Tenggara.

3.4. Perception of Intentions

Negara sebagai aktor sentral¹¹⁷ atau unit politik terpenting di dalam sistem internasional yang anarki ini, secara normatif akan selalu berusaha untuk waspada terhadap segala kemungkinan terburuk yang terjadi akibat dari interaksi antar

¹¹⁷ “Negara sebagai aktor sentral”, dalam perspektif teori tradisional, masalah keamanan berfokus pada hubungan keamanan antar negara, yang merupakan aktor internasional paling kuat. Lihat Patrick Morgan, “Security in International Politics: Traditional Approaches”, dalam Alan Collins, *Contemporary Security Studies*, New York: Oxford University Press Inc., 2007, hal. 14-15.

negara ataupun bentuk ancaman lainnya. Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas lemahnya otoritas terpusat di dalam politik internasional, karena tidak ada pemerintah di atas pemerintahan. Dengan demikian negara menganut prinsip '*self-help*', negara harus mengukur sendiri tingkat keamanannya sesuai dengan persepsinya masing-masing karena adanya ketidakpastian tentang maksud dari perilaku negara lain ataupun lingkungan eksternal lainnya. Semua itu dilakukan oleh setiap negara agar tetap *survive* di dalam sistem internasional yang anarki ini.

Untuk melihat persepsi sebuah negara dalam memperkirakan tingkat ancaman yang dihadapinya ataupun mengukur persepsi tersebut merupakan suatu hal yang tidak mudah. Robert Jervis dalam bukunya yang berjudul *Perception and Misperception in International Politics* mengemukakan bahwa dalam melihat *perception* terdapat tiga tingkat analisis, yaitu, pertama, *the international environment*, kedua, *domestic determinants*, dan yang ketiga, *the bureaucracy*.¹¹⁸ Dengan demikian cara yang mungkin dilakukan untuk mengukur atau melihat persepsi sebuah negara dengan ketiga tingkat analisis tersebut yaitu dengan mengetahui kebijakan pertahanan sebuah negara. Seperti halnya yang dikatakan oleh Stephen M. Waltz "para pembuat kebijakan menentukan kebijakan pertahanan yang sesuai dengan cara memperkirakan tingkat ancaman yang dihadapi dari negara lain".¹¹⁹ Pada umumnya untuk mengetahui kebijakan pertahanan sebuah negara kita dapat membaca Buku Putih Pertahanan (*Defense White Papers*) yang dimiliki negara tersebut.

Dalam kaitannya dengan alokasi anggaran pertahanan Indonesia, pembahasan ini akan difokuskan untuk melihat persepsi Indonesia mengenai perilaku lingkungannya. Dalam hal ini yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana Indonesia melihat potensi ancaman (baca: persepsi ancaman Indonesia). Secara normatif, apabila Indonesia merasa bahwa potensi ancaman yang mungkin akan dihadapi berupa isu-isu keamanan yang berasal dari luar atau lingkungan eksternal, terutama dengan negara-negara dalam satu kawasan

¹¹⁸ Lihat Robert Jervis, *Loc. cit.*

¹¹⁹ Lihat Stephen M. Waltz, *The Origins of Alliances*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987; dan *Revolutions and War*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1995.

(negara tetangga) maka Indonesia akan meningkatkan anggaran atau belanja pertahanannya untuk membangun militer yang professional dan modern. Dengan tujuan membangun pertahanan yang memiliki daya tangkal dan mampu mengimbangi kekuatan militer negara-negara di kawasan.

Indonesia sebagai negara terbuka, tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Selain itu Indonesia juga menyadari bahwa keamanan nasionalnya menjadi bagian dari kepentingan strategis negara-negara lain.

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2003, terdapat penjabaran konteks strategis dalam lingkup global, regional dan domestik. Pertama, lingkup global. Dinamika interaksi pada tingkat global juga memiliki implikasi terhadap tantangan keamanan nasional, walaupun Perang Dingin telah berakhir, namun ternyata tidak menjamin terciptanya stabilitas keamanan dunia. Keamanan dunia masih diwarnai dengan isu-isu tradisional seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan atau proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah masal. Selain itu juga ditambah dengan meningkatnya praktek hegemoni yang berkembang melalui penguatan aliansi, kemampuan militer, keunggulan teknologi dan ekonomi. Isu keamanan global semakin kompleks dengan mengemukanya isu-isu keamanan non-tradisional yang berdimensi ancaman keamanan lintas negara seperti terorisme, konflik etnis, pembajakan di laut atau di udara, penyelundupan, narkoba, imigran gelap dan kejahatan lintas negara lainnya.

Terorisme menjadi ramai diperbincangkan sebagai ancaman nyata bagi dunia sejak terjadi serangan terorisme pada 11 September 2001 terhadap World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat. Untuk mencegah kembali kejadian serupa, negara-negara di dunia melakukan berbagai upaya dalam memerangi terorisme. Namun upaya-upaya tersebut tampaknya belum sepenuhnya berhasil karena masih banyak bermunculan serangan-serangan terorisme di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Di sisi lain, kejahatan lintas negara terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Diantaranya adalah maraknya berbagai aksi perompakan/pembajakan, penyelundupan manusia, senjata amunisi, perdagangan obat-obatan terlarang, dan imigrasi gelap dan bentuk kejahatan lintas negara lainnya. Kondisi tersebut tentunya memberikan dampak buruk terhadap stabilitas kawasan serta negara yang bersangkutan. Kejahatan tersebut didukung oleh jaringan yang rapih berskala internasional, digerakan oleh aktor yang didukung dengan kemampuan teknologi dan finansial.

Kedua, dalam lingkup regional. Dinamika keamanan regional juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan dan kecendrungan global. Sama seperti halnya yang terjadi pada lingkup global, isu-isu keamanan non-tradisional juga menjadi isu utama dalam lingkup regional. Selain itu, kecendrungan yang muncul dalam keamanan regional adalah konflik yang menyangkut klaim teritorial, jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut. Dinamika dalam interaksi antara negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia dan Uni Eropa merupakan faktor yang berpengaruh dalam peta keamanan di Asia Pasifik.¹²⁰

Ketiga, lingkup domestik. Perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Isu keamanan domestik yang muncul juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah dampak heterogenitas suku bangsa Indonesia, situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin berat, serta faktor politik dan sosial. Akumulasi dari faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul menjadi berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional seperti gerakan separatis bersenjata, konflik komunal, gerakan kelompok radikal, kerusuhan sosial dan gangguan keamanan laut dan udara.

Dalam isu keamanan, ancaman yang berasal dari luar dan ancaman yang timbul di dalam negeri selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi,

¹²⁰ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, *Op.cit.*, hal. 13.

sehingga sulit untuk dapat dipisahkan. Perbedaannya hanya mungkin dilakukan dalam konteks bentuk dan organisasi ancaman, sementara perbedaan berdasarkan sumber timbulnya ancaman, sangat sulit ditentukan. Berangkat dari kenyataan tersebut, upaya pertahanan tidak hanya mengacu pada isu keamanan tradisional, yakni invasi atau agresi dari negara lain, tetapi juga pada isu keamanan non-tradisional, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk kepada Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2003 terdapat berbagai perkiraan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia di masa mendatang. Lihat Tabel 3.5.

Tabel 3.7 : Perkiraan Ancaman dan Gangguan Terhadap Kepentingan Pertahanan Indonesia

No.	Perkiraan Ancaman
1.	Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.
2.	Gerakan separatisme yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
3.	Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.
4.	Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah social ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.
5.	Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.
6.	Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.

7.	Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.
8.	Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.
9.	Perusak lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahand hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun da berbahaya.
10.	Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

Sumber: Diolah dari Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, 2003.

Dalam tabel perkiraan ancaman di atas terorisme berada pada urutan paling atas. Sebenarnya isu terorisme sudah sejak lama berkembang, namun semenjak terjadinya serangan bom terhadap WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001, isu ini menjadi polemik dalam politik internasional mengingat ancaman yang ditimbulkan memiliki efek yang sangat besar terhadap kelangsungan politik, ekonomi dan sosial. Terorisme merupakan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal dan tergolong sebagai isu keamanan non-tradisional. Terorisme merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, bahkan menjadi ancaman bagi demokrasi dan masyarakat sipil (*civil society*).

Di dalam kampanye anti terorisme yang dilancarkan oleh presiden Bush, Asia Tenggara ditempatkan sebagai front kedua setelah Afganistan. Asia Tenggara menjadi target kampanye terorisme dikarenakan oleh dua hal. Pertama, mayoritas penduduk kawasan ini beragama islam, yakni agama yang sama dengan yang dipeluk oleh Osama bin Laden. Kedua, kawasan ini memang terdapat beberapa kelompok minoritas Islam yang cenderung keras dalam menyampaikan aspirasi mereka yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.¹²¹ Terorisme terasosiasi dengan konflik ethno-religius di Indonesia¹²², sejak tahun 1999 hingga saat ini, kegiatan teroris di Indonesia terbilang cukup meningkat. Lihat Tabel 3.6

¹²¹ Lihat Charles E. Morrison, *Asia Pacific Security Outlook 2003*, Japan: Japan Center for International Exchange, 2003; dan Charles E. Morrison, *Asia Pacific Security Outlook 2004*, Japan: Japan Center for International Exchange, 2004.

¹²² Peter Chalk, *Grey-Area Phenomena In Southeast Asia: Piracy, Drug Trafficking and Political Terrorism*, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, 1997, hal. 62.

Tabel 3.8 : Serangkaian Serangan Terorisme di Indonesia

No.	Tanggal	Tempat Kejadian Peledakan
1.	2 Januari 1999	Toserba Ramayana di Jakarta
2.	9 Februari 1999	Mal Kelapa Gading di Jakarta
3.	15 April 1999	Plaza Hayam Wuruk di Jakarta
4.	Tahun 1999	Mesjid Istiqlal, di Jakarta (menghancurkan sejumlah ruangan dan fasilitas lainnya)
5.	28 Mei 2000	Gereja (GKPI) di Medan
6.	29 Mei 2000	Gereja Khatolik di Jalan Pemuda Medan
7.	4 Juli 2000	Gedung Kejaksaan Agung Jakarta
8.	1 Juli 2000	Kantor Komisi Pemilu (KPU) Jakarta
9.	1 Agustus 2000	Halaman Kedutaan Besar Filipina di Jakarta (menewaskan 2 orang, 22 orang luka berat, serta kerugian materil antara lain menghancurkan 29 kendaraan)
10.	30 Agustus 2000	Depan Kantor Departemen Pertanian (menghancurkan 1 buah bus penumpang)
11.	13 September 2000	Gedung Bursa Efek Jakarta (menewaskan 15 orang, serta 37 orang luka berat dan menghancurkan 81 kendaraan)
12.	11 Desember 1998, 1 Agustus 2001, dan 23 September 2001	Gedung Atrium Senen Jakarta
13.	Tahun 2000 dan 2001	Sejumlah Gedung Gereja pada malam Natal
14.	12 Oktober 2002	Bali (menewaskan lebih dari 200 jiwa dan korban luka berat WNA dan WNI, serta kerugian harta benda)
15.	5 Desember 2002	Mc Donald, Mal Ratu Indah di Makasar (menewaskan 3 orang)
16.	3 Februari 2003	Wisma Bhayangkari di Kompleks Mabes Polri,

		Jakarta Selatan
17.	Tahun 2003	Di depan Hotel JW Marriot, Jakarta (berupa serangan bom mobil)
18.	Tahun 2004	Di depan Kedutaan Australia, Jakarta

Sumber: Diolah dari Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, 2003; dan Andrew T.H Tan, *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia*, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2007.

Bentuk ancaman selanjutnya adalah gerakan separatisme bersenjata yang merupakan satu bentuk ancaman yang timbul di dalam negeri. Ancaman ini hadir di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini terdapat dua kelompok separatis besar yang berusaha memisahkan diri dari NKRI yaitu, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Masalah ini semakin kompleks ketika kelompok separatis berlindung dibalik isu HAM serta mencari dukungan dan mengalihkan basis gerakan di luar negeri.

Bentuk ancaman lain yang juga muncul di dalam negeri adalah gerakan kelompok radikal, yang melatarbelakangi gerakan tersebut adalah agama, etnik atau kedaerahan, ideologi dan politik. Keberadaan serta cara-cara kelompok radikal ini sangat mengganggu ketertiban publik dan pada muaranya akan mengganggu keamanan nasional. Tentara Indonesia memiliki pengalaman masa lalu dalam menumpas berbagai gerakan radikal di dalam negeri seperti DI/TII, PRRI, Permesta dan PKI.

Komposisi masyarakat Indonesia yang heterogen, disertai karakteristik geografis berupa negara kepulauan, sangat potensial munculnya friksi-friksi komunal. Konflik komunal dapat dipicu oleh eksklusivisme suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta kesenjangan sosial ekonomi. Selain itu, perpindahan penduduk secara masal dari satu wilayah ke wilayah lain selain berpengaruh terhadap tata kehidupan dan budaya setempat, juga berpotensi sebagai sumber konflik. Contohnya seperti yang terjadi di Maluku, Sulawesi Tengah (Poso), Kalimantan (Sanggau Ledo, Sampit, Sambas), adalah contoh nyata konflik komunal.

Perkiraan ancaman lainnya yang saat ini sedang meningkat adalah kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya. Ancaman lain yang juga mendapat perhatian lebih adalah kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.

Wilayah kedaulatan NKRI dengan lebih dari 17.500 pulau, menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, dengan garis pantai 81.000 km serta wilayah ZEE seluas 4 juta km². kegiatan perdagangan dan transportasi internasional melalui *Sea Lane of Communication* (SLOC) dan *Sea Lane of Transportation* (SLOT) di perairan Indonesia terus meningkat. Untuk itu keamanan laut sangat vital bagi Indonesia. Isu keamanan laut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan dan sabotase serta terror objek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal, termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata, serta penyelundupan kayu gelondongan melalui laut).

Pembajakan dianggap sebagai masalah yang serius di Selat Malaka, dengan panjang 550 mil laut, merupakan selat terpanjang di dunia.¹²³ Sekitar 500 hingga 600 kapal menggunakan selat tersebut setiap harinya, menjadikan selat ini sangat rawan atas pembajakan. Dari berbagai ancaman yang dihadapi Indonesia banyak sekali menimbulkan kerugian diantaranya adalah penangkapan ikan secara ilegal dengan total kerugian US\$ 2 milyar atau sekitar Rp 18 triliun per tahun, penyelundupan dengan total kerugian sekitar US\$ 1 milyar, eksploitasi pasir secara ilegal merugikan lebih dari Rp 2 triliun setiap tahun serta pencurian kayu (*illegal logging*) merugikan negara sekitar Rp 30 triliun.

¹²³ JN Mak, "Securitizing Piracy in Southeast Asia: Malaysia, the International Maritime Bureau and Singapore", dalam Mely Caballero-Anthony, Ralf Emmers dan Amitav Acharya (ed.), *Non-Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation*, Singapore: Ashgate Publishing Limited, 2006, hal. 66.

Selain gangguan keamanan laut juga terdapat gangguan keamanan udara. Sebagai salah satu poros lalu lintas dunia internasional, menempatkan Indonesia rawan terhadap berbagai ancaman keamanan udara. Isu keamanan udara meliputi ancaman kekerasan (pembajakan udara, sabotase objek vital, teror), ancaman pelanggaran udara (penerbangan gelap dan pengintaian terhadap wilayah Indonesia), ancaman sumber daya (pemanfaatan wilayah udara oleh negara lain), dan ancaman pelanggaran hukum melalui media udara (migrasi ilegal dan penyelundupan manusia).

Seiring dengan berkembangnya isu keamanan, Indonesia juga memasukan perusakan lingkungan sebagai perkiraan ancaman (seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya) serta bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

Berdasarkan perkiraan ancaman dari tabel dan uraian di atas tidak satupun yang menyebutkan bahwa terdapat ancaman dalam bentuk invasi ataupun agresi negara lain. Jadi perkiraan ancaman Indonesia menunjukkan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya. Diperkirakan, ancaman yang dihadapi lebih besar kemungkinannya yang berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri.

Perkiraan ancaman tersebut diperkuat dengan asumsi bahwa upaya diplomasi, peran PBB, dan opini dunia internasional menjadi faktor yang akan mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi negara lain untuk menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Indonesia.¹²⁴ Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama internasional dalam bidang pertahanan yang merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia sebagai salah satu jembatan untuk membangun rasa saling percaya dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lihat Tabel 3.7.

¹²⁴ Lihat Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, *Op. cit.*, hal. 53.

Tabel 3.9 : Kerjasama Pertahanan Indonesia Dengan Beberapa Negara di Kawasan Asia Tenggara

No.	Negara	Bentuk Kerjasama
1.	Singapura	Latihan bersama antarmatra, antar Angkatan Darat (SAFKAR-INDOPURA), antar Angkatan Laut (EAGLE-INDOPURA) dan antar Angkatan Udara (ELANG-INDOPURA) serta perjanjian <i>Military Training Area</i> (MTA).
2.	Malaysia	Membentuk Komite Perbatasan untuk penanganan isu-isu keamanan di wilayah perbatasan dan kerjasama pertahanan dalam bentuk latihan militer: KEKAR MALINDO, MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMANMALINDO dan DARSASA.
3.	Filipina	Kerjasama dalam isu perbatasan terdapat forum <i>Joint Commision for Bilateral Cooperation</i> (JBC)
4.	Thailand	Kerjasama dalam menyikapi isu-isu keamanan non-tradisional di kawasan Asia Tenggara.

Sumber: Diolah dari Buku Putih Pertahanan Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, 2003.

Indonesia juga senantiasa terlibat aktif dalam tugas-tugas internasional di bawah bendera PBB melalui pengiriman pasukan perdamaian kesejumlah negara yang dilanda konflik sejak tahun 1957. Dalam rangka memelihara keamanan regional, kerjasama pertahanan Indonesia diprioritaskan pada kerjasama bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara. *Association South East Asia Nations* (ASEAN) serta forum kerjasama *ASEAN Regional Forum* (ARF) merupakan wadah kerjasama yang penting untuk terus dikembangkan dengan harapan permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat diselesaikan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, perimbangan kepentingan yang dibangun

berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati dan tidak saling intervensi.¹²⁵

Di dalam hubungan antara yang satu dan lainnya, negara-negara anggota ASEAN sepakat mengikuti prinsip-prinsip dasar, yang terkandung dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) Tahun 1976¹²⁶, prinsip-prinsip tersebut adalah, pertama, sama-sama menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas territorial, dan identitas nasional seluruh bangsa. Kedua, hak setiap negara untuk berperan penting menjaga eksistensi nasional yang bebas dari intervensi, subversi dan koersi yang datang dari pihak eksternal. Ketiga, non-intervensi terhadap permasalahan internal negara lain. Keempat, penyelesaian perbedaan atau perselisihan menggunakan cara-cara damai. Kelima, penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan militer. Dan keenam, kerjasama yang efektif diantara mereka.

Terlepas dari segala kekurangannya, reputasi ASEAN selama ini, sejak dibentuk 8 Agustus 1967, telah memperlihatkan peran penting dalam menjamin stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kini ASEAN memiliki paradigm baru yang menggerakkan kerjasama ASEAN ke arah sebuah komunitas dan identitas baru yang lebih mengikat.¹²⁷ Pada 7 Oktober 2003, melalui *Declaration of ASEAN Concord II*, para pemimpin negara ASEAN memproklamkan pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yakni Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN yang saling mengikat dan memperkuat untuk mencapai tujuan bersama demi menjamin perdamaian yang dapat dipertahankan, stabilitas dan kemakmuran yang terbagi di kawasan Asia Tenggara.

ARF merupakan forum dialog keamanan negara ASEAN plus mitra dialog yang bertujuan untuk menciptakan ruang dialog dan konsultasi konstruktif bagi

¹²⁵ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, *Op. cit.*, hal. 91.

¹²⁶ Association of Southeast Asian Nations, *Overview: Fundamental Principles*, diunduh dari <<http://www.aseansec.org/64.htm>>

¹²⁷ CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar dan Ratna Shofi Inayati, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Penelitian Politik LIPI, 2008, hal. 6.

para partisipan. Kegiatan utama ARF adalah pengembangan tradisi *confidence-building measures* (CBM), *preventive diplomacy* dan nantinya diharapkan mampu mengembangkan *conflict resolution*¹²⁸. ASEAN Regional Forum pertama kali diadakan pada tahun 1994, di dalam forum tersebut sudah banyak masalah keamanan yang dibahas. Diantara tahun 2000 hingga tahun 2004, permasalahan yang dibahas antara lain adalah kejahatan transnasional seperti terorisme dan pembajakan serta ancaman lainnya terhadap keamanan maritim.¹²⁹ Selama ini ARF lebih menekankan pada pengembangan *trust* (kepercayaan) dikalangan partisipannya.

Dengan keberadaan ASEAN dan ARF tersebut Indonesia merasa yakin bahwa potensi ancaman yang datang dalam bentuk ancaman tradisional khususnya yang datang dari negara-negara se-kawasan kecil kemungkinannya bisa terjadi karena sudah terbangun kepercayaan antara satu sama lain atas kesepakatan-kesepakatan maupun kerjasama yang selama ini telah dibentuk diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu perkiraan ancaman ke depan lebih dimungkinkan oleh bentuk ancaman non tradisional yang dalam penanganannya menggunakan Operasi Militer Selain Perang.

Selain melakukan kerjasama pertahanan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia juga memiliki kerjasama dalam bidang pertahanan dengan negara tetangga lainnya seperti Papua Nugini, Timor Leste, Australia. (Lihat Tabel 3.8). dari kerjasama yang ada diharapkan dapat mengurangi terjadinya potensi konflik diantara negara-negara tersebut.

Tabel 3.8: Kerjasama Pertahanan Indonesia Dengan Beberapa Negara di Luar ASEAN

No.	Negara	Bentuk Kerjasama
1.	Papua Nugini	Joint Border Committee (JBC), berbagai agenda bersama dilaksanakan secara rutin untuk mencegah dan

¹²⁸ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 208-209.

¹²⁹ Lihat Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Regional Forum: Documents Series 1994-2004*, 2005.

		menangani masalah-masalah yang timbul.
2.	Timor Leste	Perundingan-perundingan bilateral dilakukan dalam rangka menentukan batas wilayah kedua negara.
3.	Australia	Kerjasama pertahanan lebih ditingkatkan untuk mengatasi isu-isu kejahatan lintas negara seperti terorisme dan imigran gelap, termasuk dalam penanganan masalah nelayan tradisional.
4.	Cina	Hubungan kerjasama masih dalam taraf penjajagan, Cina dapat menjadi alternatif dalam mendukung pengadaan peralatan TNI.

Sumber: Diolah dari Buku Putih Pertahanan Indonesia, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, Tahun 2003.

Australia, sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia selain ASEAN tentunya memiliki hubungan kerjasama pertahanan yang telah terjalin sejak lama, namun seringkali mengalami pasang surut sebagai dampak dari pasang surut hubungan politik kedua negara. Kerjasama yang dibangun antara Indonesia dengan Australia berdasarkan kepada prinsip-prinsip *Confidence Building Measures* (CBM) yang mengedepankan semangat kebersamaan dan pertimbangan kepentingan dan dibangun berdasarkan persamaan hak, saling menghormati, dan tidak mencampuri urusan internal masing-masing kedua belah pihak. Hubungan kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Indonesia dengan Australia lebih difokuskan kepada bagaimana mengatasi isu-isu kejahatan lintas negara seperti terorisme dan imigran gelap, termasuk dalam penanganan masalah nelayan tradisional.¹³⁰

Selain memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia, Australia juga menjalin hubungan dengan ASEAN sejak tahun 1974 melalui *ASEAN-Australia Dialogue Relationship*.¹³¹ Lebih khusus lagi dalam kerjasama bidang politik dan keamanan, Australia aktif berpartisipasi dalam ASEAN Regional Forum (ARF),

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Association of Southeast Asia Nations, *Overview of ASEAN-Australia Dialogue Relationship*, diunduh dari <<http://www.aseansec.org/23213.htm>>.

merupakan forum inter-pemerintahan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan keamanan melalui dialog dan kerjasama di Asia Pasifik. Australia pernah menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan ARF *Inter-Sessional Meetings* (ISMs) pada *CBMs and the ARF Workshops on Managing the Consequences of Major Terrorist Attacks*.¹³² *ASEAN Post Ministerial Conferences* (PMCs) dan *ASEAN-Australia Forum* merupakan sarana yang penting bagi kedua belah pihak untuk meninjau kembali isu-isu kerjasama kontemporer dalam bidang politik, keamanan, ekonomi dan pembangunan dengan menggunakan dialog kemitraan. Dengan adanya kerjasama tersebut maka Indonesia merasa aman dan tidak menganggap Australia sebagai ancaman yang nyata dari arah selatan Indonesia.

Sebagai perbandingan dalam melihat proyeksi perkiraan ancaman di masa mendatang, kita dapat melihat perkiraan ancaman dalam Buku Putih Pertahanan Tahun 2008. Di dalam Buku Putih Pertahanan Tahun 2008, ancaman digolongkan ke dalam dua bagian yaitu, ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.¹³³ Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi terror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Sedangkan ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.¹³⁴ Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, social budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

Pada hakikatnya, perkiraan ancaman dalam Buku Putih Pertahanan Tahun 2008 tidak begitu jauh berbeda dengan perkiraan ancaman dalam Buku Putih Pertahanan Tahun 2003. Intinya sama-sama menganggap bahwa ancaman tradisional kecil kemungkinan dapat terjadi dibandingkan dengan ancaman

¹³² *Ibid.*

¹³³ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, Jakarta: Dephan RI, 2008, hal. 27.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 31.

keamanan non tradisional. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap alokasi anggaran pertahanan Indonesia di tahun 2005 hingga 2009.

3.5 Kesimpulan

Untuk perbandingan kemampuan militer di bagi dalam dua komponen yaitu *military personnel* dan *defense budget* atau *military expenditures*. Bila dilihat dari total keseluruhan secara kuantitatif, maka Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan jumlah personil militer terbanyak, namun bila dilihat dari wilayah yang sangat luas, karakter geografi yang lebih didominasi oleh perairan dan potensi ancaman yang bersifat multidimensi maka hal tersebut masih dirasa kurang cukup. Selain hal tersebut bila jumlah *military personnel* Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk lebih dari 200 jiwa sangatlah tidak sebanding dengan persentase nol persen. Sedangkan untuk perbandingan besaran belanja pertahanan Indonesia menempati posisi dalam urutan kedua setelah Singapura. Namun bila dilihat perbandingan persentase alokasi anggaran pertahanan dari GDP, Indonesia posisinya paling rendah dengan rata-rata 1% GDP, sedangkan Singapura menempati posisi tertinggi dengan persentase mencapai 5% dari GDP. Hal tersebut menggambarkan bahwa dari segi alokasi anggaran pertahanan Indonesia hingga saat ini belum mampu melakukan fungsi perimbangan kekuatan militer dalam kawasan.

Dengan kompleksitas *geography* yang dimiliki Indonesia dari sisi *size*, *location*, *topography* dan *climate* menempatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah rawan yang memiliki potensi tinggi terjadinya ancaman non-tradisional seperti perompakan, perdagangan gelap (senjata, narkoba dan obat bius, serta perempuan dan anak-anak), terorisme internasional dan atau terorisme maritim. Meskipun kecil kemungkinannya mengalami invasi konvensional secara besar-besaran, Indonesia juga harus tetap berhadapan dengan berbagai potensi konflik tradisional seperti separatisme bersenjata, sengketa perbatasan, sabotase terhadap instalasi-instalasi strategis, perlindungan atas jalur laut dan perlindungan sumber daya. Melihat perbandingan kekuatan yang dimiliki dengan ruang yang ada (*force*

to space ratio) yang belum sesuai atau ideal tidak ada alasan bagi Indonesia untuk merasa aman dengan *geography* yang dimilikinya.

Sedangkan untuk melihat perbandingan antar kekuatan negara-negara utama di kawasan Asia Tenggara (*force to force ratio*) menggunakan penilaian terhadap *offense-defense balance*. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa nilai *offense-defense balance* Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Untuk nilai *offense-defense balance* Indonesia sebesar 19,64, sedangkan untuk Thailand sebesar 9,22, Singapura sebesar 4,66 dan untuk Malaysia sebesar 0,79. Dengan demikian Indonesia memiliki kekuatan sebagai penyeimbang diantara kekuatan-kekuatan negara di kawasan Asia Tenggara.

Faktor yang terakhir adalah *perception of intentions* yang dimiliki Indonesia dalam melihat potensi ancaman yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. Merujuk kepada perkiraan ancaman yang tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2003 tidak satupun yang menyebutkan bahwa terdapat ancaman dalam bentuk invasi ataupun agresi negara lain. Jadi perkiraan ancaman Indonesia menunjukkan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya. Diperkirakan, ancaman yang dihadapi lebih besar kemungkinannya yang berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri.